

**Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di
Provinsi Jawa Tengah
(Tahun 2010– 2015)**

SKRIPSI



Oleh :

Nama : Kusumawati Astuti Susilo

Nomor Mahasiswa : 14313056

Jurusan : Ilmu Ekonomi

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA**

2018

Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di
Provinsi Jawa Tengah
(Tahun 2010 - 2015)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar

Sarjana jenjang strata 1
Jurusan Ilmu Ekonomi,
Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Oleh

Nama : Kusumawati Astuti Susilo

Nomor Mahasiswa : 14313056

Jurusan : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Desember 2017

Penulis,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', the number '7000AEP712021528', and the value '6000' with a gear icon.

Kusumawati Astuti Susilo

PENGESAHAN

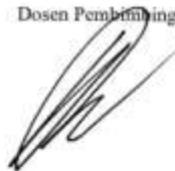
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2010-2015

Nama : Kusumawati Astuti Susilo
Nomor Mahasiswa : 14313056
Program Studi : Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 15 Desember 2017

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Suharto S.E., M.Si

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN PENDAPATAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2010-2015**

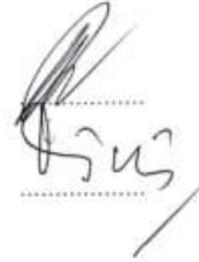
Disusun Oleh : **KUSUMAWATI ASTUTI SUSILO**
Nomor Mahasiswa : **14313056**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Rabu, tanggal: 17 Januari 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Suharto, SE., M.Si.

Penguji : Diana Wijayanti, Dra., M.Si.



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

Hanya karna kau pernah terjatuh sekali dua kali, bukan berarti kau harus menyerah berkali-kali. Ketahuilah bahwa kesuksesan bukan diukur dari seberapa sering kau jatuh tapi dari seberapa kuat kau bangkit ketika kau terjatuh.

(Penulis)



HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi yang jauh dari kata sempurna
tapi memiliki makna tersendiri ini
penulis persembahkan untuk kedua
orang tuaku dan untuk seluruh*

keluargaku

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbi'l'amin, segala puji syukur atas segala Berkah, Nikmat, Rahmat, Karunia, serta Hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahuwa Ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena hanya dengan Nikmat, Rahmat dan Karunia-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah (Tahun 2010-2015)”**

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana strata (S-1) di bidang Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulisan skripsi ini bukan semata-mata hasil jerih payah penulis sendiri, akan tetapi juga berkat dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. D. Agus Hardjito, M.Si, Ph.D, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan studi dengan baik
2. Suharto S.E., M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan selama proses pembuatan tugas akhir ini.
3. Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti yang nantinya akan diterapkan dengan sebaik-baiknya.
4. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat baik moril maupun materil dan do'a yang tak henti-hentinya.

5. Kedua kakakku Nugraheni Debie Susilo dan Kurniawan Pradana Susilo yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. Sahabatku seperjuangan Ninie Punkkasari, Agustin Vertriani, Titin Suhartinah yang selalu menemani dan memberikan masukan dalam pembuatan dan penyelesaian tugas akhir ini.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta, pihak-pihak yang memerlukan. Semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT, Aamiin Yaa Rabal Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 20 Desember 2017

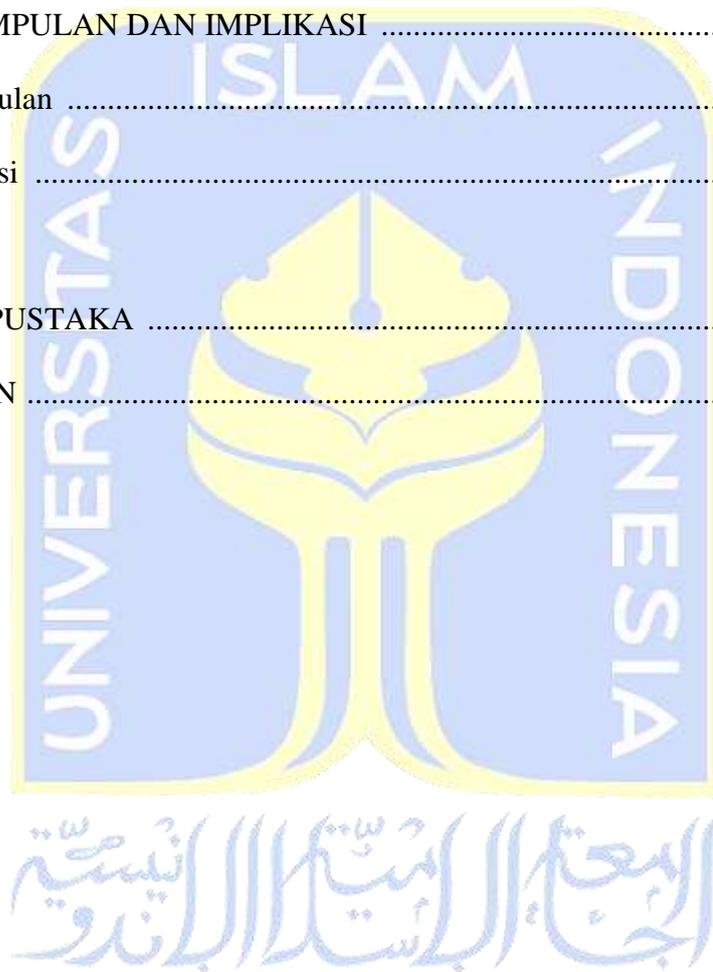
Kusumawati Astuti Susilo

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pernyataan Bebas Plagiarisme	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Halaman Pengesahan Ujian	iv
Halaman Motto	v
Halaman Persembahan	vi
Halaman Kata Pengantar	vii
Halaman Daftar Isi	ix
Halaman Daftar Tabel	xii
Halaman daftar Gambar	xiii
Halaman Lampiran	xiv
Halaman Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
2.1 Kajian Pustaka	13
2.2 Landasan Teori	16

2.2.1 Teori Ketimpangan Pendapatan antar Wilayah	16
2.2.1.1 Teori Indeks Gini	19
2.2.2.2 Kriteria Bank Dunia	21
2.2.2.3 Indeks Theil dan Indeks L.....	21
2.2.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan.....	22
2.2.3 Hubungan Upah Minimum dengan Ketimpangan Pendapatan.....	25
2.2.4 Hubungan IPM dengan Ketimpangan Pendapatan	28
2.2.5 Hubungan Belanja Modal dengan Ketimpangan Pendapatan.....	30
2.2.6 Hubungan Inflasi dengan Ketimpangan Pendapatan	33
2.3 Kerangka Pemikiran	35
2.4 Hipotesis Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis dan Sumber Data	37
3.2 Definisi Operasional Penelitian	37
3.3 Metode Analisis	39
3.3.1 Metode Analisis Data Panel.....	39
3.3.2 Pemilihan Model Data Panel.....	43
3.3.3 Pengujian Statistik.....	45
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	49
4.1 Diskripsi Data Penelitian	49
4.2 Hasil dan Analisis	49

4.2.1 Pemilihan Model dalam Pengolahan Data	49
4.2.2 Hasil Pengujian Statistik	52
4.2.3 Analisis Persamaan Koefisien dan Intersep Pembeda	57
4.2.4 Interpretasi Hasil dan Analisis.....	60
BAB V SIMPULAN DAN IMPLIKASI	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Implikasi	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74



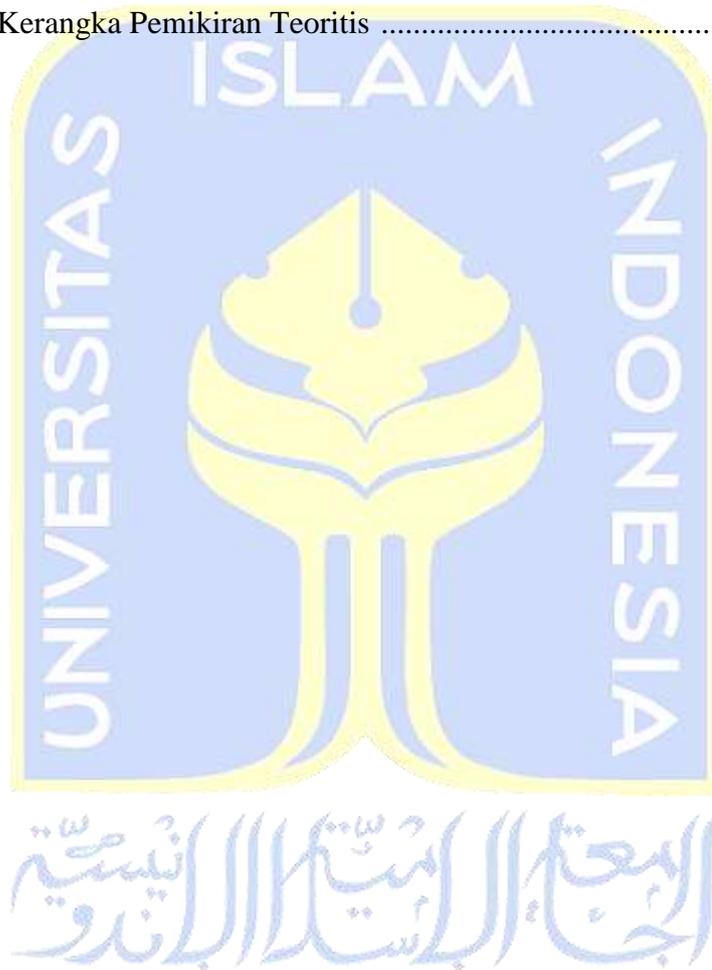
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kondisi Ketimpangan di Indonesia dilihat dari Gini Rasio	4
Table 1.2	Gini Rasio Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2015	5
Tabel 1.3	Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015	7
Table 1.4	Inflasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015	8
Table 1.5	Pengeluaran pemerintah Jawa Tengah Tahun 2010-2015	9
Table 1.6	Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah Tahun 2010-2015	10
Tabel 4.1	Uji Signifikansi <i>Fixed Effect</i>	50
Tabel 4.2	Uji Hausman	51
Tabel 4.3	Hasil Uji Estimasi <i>Fixed Effect</i>	52
Tabel 4.4	Intersep <i>Cross Effect</i> Lima Teratas	57
Tabel 4.5	Intersep <i>Cross Effect</i> Lima Terbawah	58
Tabel 4.6	Intersep <i>Period Effect</i>	60



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Indeks Gini	20
Gambar 2.2 Perkembangan Pola Pemerintah Pola <i>Steplike</i>	31
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	35



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran I Data Ketimpangan Jawa Tengah	75
Lampiran II Data Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah	76
Lampiran III Data Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah.....	77
Lampiran IV Data Upah Minimum Regional Jawa Tengah.....	78
Lampiran V Data Inflasi Jawa Tengah.....	79
Lampiran VI Data Belanja Modal Jawa Tengah	80
Lampiran VII Uji Signifikansi <i>Common Effect</i>	81
Lampiran VIII Uji Signifikansi <i>Random Effect</i>	82
Lampiran IX Uji Signifikansi <i>Fixed Effect</i>	83
Lampiran X Uji Hausman	84
Lampiran XI Uji Chow.....	85



ABSTRAK

Pertumbuhan dan pembangunan seharusnya dapat berjalan beriringan tanpa perlu mengunggulkan salah satunya. Dengan mengutamakan tujuan pembangunan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, maka aspek tujuan pemerataan akan tersingkir. Sehingga ketimpangan pendapatan akan terjadi antara wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect*). Data yang digunakan adalah data sekunder 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2010-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan variabel indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, belanja modal, inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah periode 2010- 2015.

Kata Kunci : *Pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, belanja modal, inflasi.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suatu ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan yang berkembang apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur keberhasilan suatu pembangunan sampai sejauh mana aktivitas perekonomian menghasilkan tambahan pendapatan terhadap masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator pembangunan suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui total Produk Domestik Bruto atau PDB suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Suatu Negara dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonominya meningkat disertai dengan tanpa adanya ketimpangan antar daerah.

Pembangunan ekonomi biasanya sering dikaitkan dengan Negara-negara berkembang, pembangunan ekonomi memang menjadi tujuan utama bagi Negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Banyak kendala yang dihadapi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi berskala besar (Hakim,2002). Pembangunan merupakan suatu hal yang penting bagi suatu Negara. Adanya keberhasilan pembangunan ekonomi berdasarkan teori Todaro ditunjukkan oleh tiga hal pokok, yang pertama yaitu dilihat

dari perkembangan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kedua dilihat dari meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, dan yang ketiga dapat dilihat dari peningkatan kemampuan masyarakat untuk memilih yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia (Arsyad,2004). Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara memang sangat penting khususnya di Negara-negara berkembang salah satunya adalah Indonesia. Pembangunan ekonomi di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat agar lebih sejahtera, dan makmur. Sebenarnya, hal yang paling penting dalam sebuah pembangunan daerah adalah bagaimana setiap daerah mampu mengidentifikasi sektor-sektor apa saja yang menjadi unggulan di daerahnya dan mampu mengelola, sehingga nantinya sektor tersebut dapat menjadi nilai tambah bagi pembangunan ekonomi di daerahnya.

Pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai kenaikan pendapatan perkapita, karena kenaikan pendapatan perkapita merupakan suatu pencerminan dari timbulnya perbaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat (Suryana,2000). Pada dasarnya pertumbuhan dan pembangunan seharusnya dapat berjalan beriringan tanpa perlu mengunggulkan salah satunya. Pembangunan yang tidak dikendalikan dengan baik menimbulkan banyak masalah seperti halnya semakin tingginya kemiskinan, tingginya pengangguran, produktivitas yang rendah, dll. Masalah lain yang dapat muncul akibat pembangunan di Indonesia yang tidak merata yaitu, adanya ketimpangan pembangunan antar daerah sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan merupakan suatu masalah yang sering dihadapi, dimana pemerintah lebih mementingkan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuan awal pembangunan pada tahap awal pada dasarnya lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka aspek prioritas dengan kriteria efisiensi yang tinggi menyebabkan sektor-sektor ekonomi tumbuh tidak merata (Hasibuan,1993). Mengutamakan tujuan pembangunan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi menyebabkan aspek tujuan pemerataan akan tersingkir. Sebaliknya, jika tujuan pembangunan yang utama adalah pemerataan (misalnya dalam hal pembagian pendapatan), maka tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat tercapai (Hasibuan,1993).

Ketimpangan antar daerah merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh negara berkembang khususnya Indonesia. Ketimpangan dapat berupa ketimpangan pendidikan, ketimpangan ekonomi, ketimpangan pendapatan, ketimpangan kesehatan, dan ketimpangan industri (Agusta,2014). Adanya ketimpangan pendapatan disuatu daerah menunjukkan adanya perbedaan pendapatan yang diterima masyarakat pada masing-masing daerah. Masalah ketimpangan saat ini menjadi fokus pemerintah. Pada negara berkembang ketimpangan pendapatan menjadi fokus penting, Professor Kuznet mengemukakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, kondisi distribusi pendapatan cenderung memburuk atau mengalami kondisi dimana ketimpangan pendapatan sangat tinggi. Akan tetapi, pada tahap berikutnya akan semakin membaik. Hipotesis tersebut dikenal dengan hipotesis “U-terbalik”. Pemerataan

pendapatan memang sangat penting untuk dipantau khususnya di Negara berkembang yang merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional.

Ketimpangan di Indonesia masih cukup tinggi, perbedaan tersebut dapat terlihat antara wilayah kawasan bagian timur dengan kawasan wilayah bagian barat Indonesia. Perbedaan wilayah, perbedaan Sumber Daya Manusia, keadaan geografis merupakan penyebab terjadinya ketimpangan pendapatan, sehingga akan terciptanya wilayah yang maju akan semakin maju dan yang tertinggal akan semakin tertinggal. Kesenjangan terjadi dapat bermula dari perbedaan pembangunan antar wilayah, seperti halnya perbedaan infrastruktur dari mulai kondisi jalan, kesehatan, pemukiman, perumahan dan lain-lain.

Tabel 1.1

Kondisi Ketimpangan di Indonesia dilihat dari Gini Rasio (persen)

Provinsi	Tahun						Rata-rata
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
DKI Jakarta	0,44	0,42	0,43	0,43	0,43	0,41	0,42
Jawa Barat	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Jawa Tengah	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38	0,37	0,38
DI Yogyakarta	0,40	0,43	0,44	0,42	0,43	0,42	0,42
Jawa Timur	0,37	0,36	0,36	0,37	0,42	0,40	0,38
Banten	0,40	0,39	0,40	0,40	0,40	0,39	0,39
Indonesia	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40

Sumber : BPS RI

Selain itu ketimpangan juga terlihat pada tiap-tiap daerah di Indonesia, salah satunya yang terjadi di Pulau Jawa dapat dilihat dari tabel 1.1. Ketimpangan yang semakin besar menyebabkan berbagai masalah diantaranya adalah

meningkatnya angka kriminalitas, meningkatnya imigrasi yang nantinya akan berpengaruh pada ketidakstabilan dalam perekonomian. Masalah ketimpangan juga terjadi pada provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Pulau Jawa. Ketimpangan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari tabel gini rasio di bawah ini.

Tabel 1.2
Gini Rasio Provinsi Jawa Tengah (persen)

Tahun	Gini Rasio
2010	0,37
2011	0,38
2012	0,38
2013	0,39
2014	0,38
2015	0,38

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Ketimpangan di Jawa Tengah terjadi penurunan pada tahun 2013 ke tahun 2014 dari semula 0,39 menjadi 0,38, penurunan juga terjadi pada tahun 2015 ke 2016 dari 0,38 menjadi 0,37. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam mengurangi ketimpangan yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Penurunan tersebut tidak memberi pengaruh banyak terhadap masyarakat Jawa Tengah, dikarenakan angka rasio gini Provinsi Jawa Tengah masih pada skala cukup tinggi untuk ukuran ketimpangan pendapatan.

Kesenjangan yang cukup tinggi di Jawa Tengah menyebabkan 15 Kabupaten dari 35 kabupaten/kota masih merupakan daerah yang tertinggal. Terdapat 3 daerah yang dikatakan maju di Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang, Kudus, dan Cilacap karena daerah tersebut merupakan kawasan industri terbesar di Jawa Tengah. Kontribusi industri merupakan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, dimana pada tahun 2016 industri berkontribusi sebesar 34,82% bagi perekonomian di Jawa Tengah. Dilihat dari pendapatan perkapita masing-masing daerah terdapat 5 kabupaten yang tergolong miskin yaitu Kebumen, Grobogan, Wonosobo, Blora, dan Tegal.

Perbedaan tingkat upah yang diterima masyarakat juga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan yang terjadi di provinsi Jawa Tengah. Adanya perbedaan pendapatan yang diterima masing-masing masyarakat akan berpengaruh pada pemenuhan hidup setiap masyarakat. Pekerja-pekerja muda yang tingkat pendidikan dan keterampilannya relatif rendah akan memperoleh upah yang rendah pula, hal tersebut menyebabkan perbedaan pembagian pendapatan semakin panjang (Hasibuan,1993).

Perbedaan upah yang diterima masyarakat dapat disebabkan karena adanya masalah pada produktivitas masyarakat. Tingkat upah minimum provinsi dijadikan dasar penetapan tingkat upah minimum kabupaten bagi daerah yang belum dapat menentukan upah minimumnya.

Tabel 1.3

UMP Provinsi Jawa Tengah (Rupiah)

Tahun	UMP
2010	Rp. 660.000,-
2011	Rp. 675.000,-
2012	Rp. 765.000,-
2013	Rp. 830.000,-
2014	Rp. 910.000,-
2015	Rp. 910.000,-

Sumber : Badan Pusat Statistik RI

Upah minimum provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan adanya peningkatan pada setiap tahunnya, dilihat pada tahun 2011 yang sebelumnya Rp. 675.000, pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 765.000. Peningkatan juga terjadi pada tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 830.000 dan Rp. 910.000. Peningkatan upah minimum ini dilakukan seiring meningkatnya nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) setiap masyarakat.

Semakin tinggi upah atau uang yang akan diterima masyarakat akan menimbulkan masalah baru yang akan menimbulkan ketimpangan pendapatan semakin memburuk salah satunya adalah inflasi. Upah tinggi yang diterima oleh sebagian masyarakat akan memberikan perbedaan jumlah konsumsi, karena bagi sebagian orang yang memiliki pendapatan tinggi pasti akan menambah jumlah konsumsinya, semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi pula jumlah pengeluarannya. Semakin tingginya jumlah pengeluaran tanpa ada

pengendalian akan memberikan dampak pada tingkat inflasi didaerah tersebut, karena jumlah uang yang beredar dimasyarakat akan semakin tinggi menyebabkan tingkat inflasi semakin meningkat.

Tabel 1.4

Inflasi Provinsi Jawa Tengah



Tahun	Inflasi (%)
2010	6,68
2011	2,68
2012	4,24
2013	7,99
2014	8,22
2015	2,73

Sumber : BPS Jawa Tengah

Tabel inflasi diatas menunjukkan tingkat inflasi di Provinsi Jawa Tengah, dari tabel diatas menunjukkan inflasi Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi dari tahun 2010-2015. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan 2014, peningkatan inflasi menyebabkan harga barang pokok menjadi mahal. Tingginya inflasi akan semakin mempersulit masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhannya, inflasi menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok menjadi tinggi. Hal tersebut menyebabkan kesenjangan yang terjadi akan semakin meningkat karena tingginya inflasi hanya memberikan dampak positif bagi kalangan masyarakat yang memiliki pendapatan tinggi.

Tingginya jumlah uang beredar dimasyarakat dapat juga disebabkan oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah yang dilakukan untuk membangun proyek-proyek tertentu atau untuk gaji pegawai.

Tabel 1.5

Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Rupiah)

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2010	Rp. 33.318.453.721
2011	Rp. 35.974.901.273
2012	Rp. 12.402.215.659
2013	Rp. 12.730.236.616
2014	Rp. 16.846.898.289
2015	Rp. 17.547.686.334

Sumber : BPS Jawa Tengah

Masalah lain yang dapat menyebabkan ketimpangan adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Daerah yang memiliki IPM yang tinggi akan memiliki kualitas masyarakat yang baik sehingga akan membantu dalam hal pembangunan. IPM yang tidak merata akan menyebabkan perbedaan pembangunan, karena daerah yang IPM yang tinggi akan lebih maju dalam pembangunan, sehingga dapat mengatasi masalah ketimpangan pendapatan yang terjadi di daerah Jawa Tengah. IPM yang rendah akan mempengaruhi keinginan bekerja bagi seseorang.

Tabel 1.6

IPM Provinsi Jawa Tengah (persen)

Tahun	IPM
2010	66,08
2011	66,64
2012	67,21
2013	68,02
2014	68,78
2015	69,49

Sumber : BPS Jawa Tengah

IPM di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan angka yang baik, IPM menunjukkan seberapa baik kualitas manusia di wilayah tersebut yang dilihat dari Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, rata-rata lama sekolah, dan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli. IPM di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya, dilihat dari 2010-2015 yang mengalami peningkatan.

Berdasarkan masalah dan fakta diatas, untuk mengetahui sejauh mana masing-masing faktor mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, maka penulis mengkaji masalah dalam bentuk penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ?
5. Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap ketimpangan pendapatan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ?
6. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, indeks pembangunan manusia, belanja modal, dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Menganalisis pengaruh upah minimum regional terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Menganalisis pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh belanja modal pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
5. Menganalisis pengaruh inflasi pemerintah terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
6. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, indeks pembangunan manusia, belanja modal dan inflasi pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan informasi, memberikan tambahan wawasan, dan dapat dijadikan referensi bagi pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Pustaka

Abdulah (2013) meneliti menggunakan data sekunder dengan panel metode Data *regression* selama 10 tahun, terdapat 35 data *cross section* yang mewakili setiap kabupaten. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan variabel urbanisasi, upah minimum, dependensi rasio, *share output* perekonomian pemilik modal sebagai variabel independen dan ketimpangan pendapatan sebagai variabel dependen.

Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa dua variabel yang signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di provinsi Jawa Tengah yaitu variabel upah minimum dan *share output* perekonomian pemilik modal. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu urbanisasi dan dependensi rasio tidak signifikan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian kali ini adalah terletak pada variabel yang digunakan penelitian sebelumnya menggunakan variabel urbanisasi, upah minimum, dependensi rasio, *share output* perekonomian pemilik modal, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum regional, tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia. Perbedaan lainnya yaitu terletak pada tahun, penelitian

sebelumnya menggunakan periode selama 10 tahun dimulai pada tahun 2002-2011, sedangkan tahun yang digunakan peneliti dimulai pada tahun 2010-2015.

Rosyadi (2014) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar Provinsi di Pulau Sumatera”. Penelitian tersebut menggunakan data panel dengan objek penelitian 10 Provinsi di pulau Sumatera dari tahun 2008-2010. Variabel yang digunakan adalah inflasi, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai variabel dependennya yang diukur menggunakan indeks gini.

Hasil dari penelitian Rosyadi adalah variabel inflasi dan UMP mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan, variabel tingkat pengangguran mempunyai pengaruh negatif, dan pertumbuhan ekonomi yang digambarkan melalui Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 tidak berpengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan distribusi pendapatan dikarenakan saat kenaikan pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera pemerataan pembangunan tidak dirasakan oleh semua kalangan. Pembangunan hanya dirasakan pada tahap awal, untuk pembangunan selanjutnya peningkatan tidak dibarengi dengan pendistribusian yang merata.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian kali ini terletak pada objek yang diteliti, tahun, dan variabel yang digunakan. Penelitian Rosyadi melakukan penelitian di Pulau Sumatera dengan 10 Provinsi dari tahun 2008-2010 dengan variabel inflasi, upah minimum provinsi, tingkat pengangguran, dan

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan, penelitian kali ini melakukan penelitian di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Kabupaten/Kota pada tahun 2010-2015 dengan menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, upah minimum regional, belanja modal dan inflasi.

Shanty dan Suardhika (2014) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali”. Data yang digunakan adalah data sekunder menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2008-2012 dengan menggunakan data panel, teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi linear berganda.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DAU dan Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, sedangkan secara parsial PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dan untuk belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Lestari (2016) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Timur”, dalam penelitian tersebut menggunakan Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, dan Jumlah Penduduk sebagai variabel independennya. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode *explanatory*, yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terkait dengan menggunakan data sekunder.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Diah Pradnya Dewi dan Ida Bagus Putu (2017) meneliti tentang “Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali”. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder periode 2008-2015, observasi non partisipan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dan analisis jalur sebagai teknik analisisnya.

Hasil dari penelitian tersebut terdapat pengaruh langsung dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan IPM dan investasi tidak berpengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening yang mempengaruhi IPM dan biaya infrastruktur secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Ketimpangan Pendapatan Antar Wilayah

Teori disparitas pendapatan wilayah dikemukakan oleh Jeffery G. Williamson (Adisasmita, 2013). Dalam suatu wilayah yang memiliki pendapatan perkapita tinggi pasti diikuti dengan perbedaan pendapatan perkapita yang di terima pada masing-masing masyarakat. Selain itu dalam pembangunan tahap

awal, pertumbuhan akan terlihat merata dalam masing-masing wilayah, kemudian saat pembangunan menginjak pada tahap lanjut perbedaan pertumbuhan akan semakin terlihat dan semakin besar. Apabila hal tersebut terjadi artinya ketimpangan pendapatan antar wilayah juga semakin besar.

Perbedaan kondisi, potensi, dan karakteristik antar wilayah mengakibatkan kesenjangan pertumbuhan dan disparitas pendapatan antar wilayah tidak dapat dihindari. Terdapat beberapa cara untuk mengurangi disparitas pendapatan dan kesenjangan pertumbuhan, salah satunya dengan menggunakan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Kedua cara tersebut merupakan faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi adanya ketimpangan pendapatan antar wilayah. Adanya ketimpangan di suatu daerah memberikan dampak negatif untuk daerah tersebut, dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro dan Smith, 2003).

Kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan: (a) *tinggi*, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan; (b) *sedang*, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan; (c) *rendah*, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan (Kuncoro,1997). Sedangkan menurut kriteria Bank Dunia dalam (BPS,2014) menyatakan bahwa dalam mengukur ketimpangan pendapatan membagi

penduduk menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kelompok 40 persen penduduk berpendapatan menengah, dan kelompok 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan ditentukan berdasarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk berpendapatan rendah. Ketimpangan pendapatan memberi pengaruh secara tidak langsung terhadap orang yang memiliki pendapatan yang tidak mencukupi, adanya ketimpangan pendapatan menandakan adanya perbedaan pendapatan yang diterima antara kaum yang berpenghasilan tinggi dan kaum yang berpenghasilan kaya.

Ekonom pemenang Nobel Simon Kuznet menghipotesiskan bahwa sepanjang industrialisasi, ketimpangan distribusi pendapatan mengikuti pola kurva U-terbalik, pertama meningkat kemudian menurun seiring berjalannya pertumbuhan ekonomi (Hakim,2002). Kuznet juga mengasumsikan bahwa kelompok pendapatan tinggi memberikan kontribusi modal dan tabungan yang besar sementara modal dari kelompok lainnya sangat kecil. Selain itu perbedaan dalam kemampuan menabung akan mempengaruhi konsentrasi peningkatan proporsi pemasukan dalam kelompok pendapatan tinggi, kemudian akan memperbesar kesenjangan pendapatan dalam suatu Negara.

Terjadinya ketimpangan antar wilayah membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Adanya ketimpangan pendapatan dalam suatu daerah menandakan pendapatan yang diterima antara kelompok bawah dengan kelompok atas tidak sama. Bagi kelompok bawah perbedaan ini akan mempengaruhi kesejahteraan dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.

2.2.1.1 Teori Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan tidak lepas dari angka rasio gini. Koefisien gini merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh (BPS, 2014). Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut :

$$G = 1 - \sum_{i=1}^k \frac{P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10000}$$

Dimana :

G = Gini Ratio

P_i = Presentase pendaptan rumah tangga pada kelas ke-i

Q_i = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i

Q_{i-1} = Presentase kumulatif pendapatan sampai dengan kelas ke-i-1

k = Banyaknya kelas pendapatan

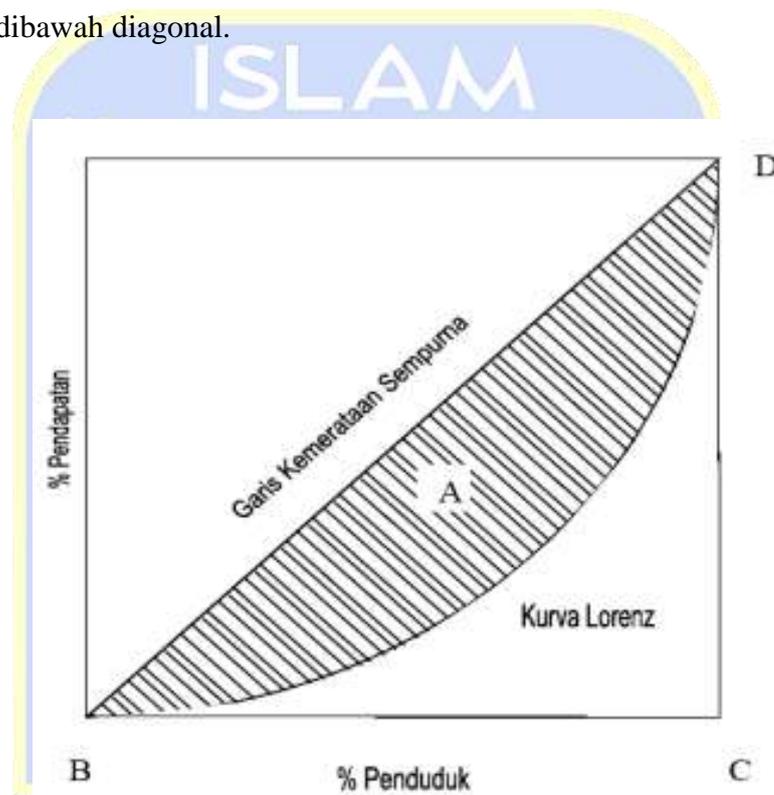
Dalam menentukan kriteria ketimpangan pendapatan berada pada taraf rendah, sedang, atau tinggi dapat dilihat dari kriteria berikut ini :

- Ketimpangan dalam taraf rendah apabila $G < 0.35$
- Ketimpangan dalam taraf sedang apabila G antara $0.35 - 0.50$
- Ketimpangan dalam taraf tinggi apabila $G > 0.50$

Gini rasio diukur mulai angka 0 hingga 1, semakin tinggi nilai indeks gini pada suatu daerah maka menunjukkan bahwa ketidakmerataan pendapatan pada daerah tersebut semkin tinggi. Indeks gini yang menunjukkan angka nol menunjukan bahwa daerah tersebut terdapat pemerataan pendapatan

yang sempurna, atau tidak ada ketimpangan pendapatan. Sedangkan indeks gini yang menunjukkan angka 1 artinya bahwa daerah tersebut mengalami ketidakmerataan sempurna.

Menurut Musfidar (2012) Gini rasio dihitung dengan membandingkan antara luas diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga dibawah diagonal.



Gambar 2.1
Indeks Gini

Gini rasio juga memiliki kelemahan yaitu besarnya nilai gini rasio tidak dapat menjelaskan dimana letak ketimpangannya (BPS,2016). Untuk mengatasi kelemahan tersebut dibutuhkan ukuran lain untuk melengkapi

kelemahan tersebut seperti kriteria Bank Dunia, sehingga nantinya dapat mengetahui letak kelas penduduk kelas bawah dan atas.

2.2.1.2 Kriteria Bank Dunia

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan menurut Bank Dunia dibagi menjadi 3 kelompok yaitu, kelompok 40 persen penduduk yang mempunyai pendapatan rendah, 40 persen penduduk yang mempunyai pendapatan sedang, dan 20 persen penduduk yang mempunyai pendapatan tinggi. Ketidakmerataan dikatakan tinggi apabila 40 persen penduduk yang memiliki pendapatan rendah menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan sedang atau moderat ketika 40 persen penduduk yang memiliki pendapatan sedang menerima 12 hingga 17 persen dari pendapatan yang mereka terima. Terakhir, ketidakmerataan rendah apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima lebih dari 17 persen pendapatan yang mereka terima.

2.2.1.3 Indeks Theil dan Indeks L

Indeks Theil dan indeks L sangat banyak digunakan untuk mengukur ketimpangan yang terjadi pada suatu wilayah. Kedua indeks tersebut masuk dalam family ukuran ketimpangan “*generalized entropy*” (BPS, 2016), rumus untuk menghitung “*generalized entropy*” secara umum dapat ditulis sebagai berikut :

$$GE(\alpha) = \frac{1}{\alpha(\alpha - 1)} \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)^\alpha - 1 \right]$$

\bar{y} merupakan rata-rata pendapatan (pengeluaran)

Nilai yang digunakan GE sangat bervariasi yaitu antara 0 dan ∞ , dimana 0 berarti distribusi merata dan nilai yang lebih tinggi berarti tingkat ketimpangan dalam kondisi yang buruk. Parameter α mewakili penimbang yang diberikan jarak antara pendapatan yang berbeda dari distribusi pendapatan. Ketika nilai α rendah artinya GE lebih cocok untuk mencerminkan perubahan distribusi pada kalangan penduduk miskin, dan ketika nilai α lebih tinggi artinya GE lebih cocok untuk mencerminkan perubahan distribusi dari kalangan penduduk kaya.

Nilai α yang paling sering digunakan adalah 0 dan 1 (BPS, 2014), dimana :

- a. GE (1) disebut indeks Theil, dengan rumus sebagai berikut :

$$GE(1) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right) \ln \left(\frac{y_i}{\bar{y}} \right)$$

- b. GE (0) disebut indeks-L atau ukuran deviasi log rata-rata, karena ukuran tersebut memberikan standar deviasi dari log (y) :

$$GE(0) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{\bar{y}}{y_i} \right)$$

2.2.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Ketimpangan Pendapatan

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiri Into The Nature and Causes Of The Wealth of Nations* (1776), mengemukakan bahwa kebijakan *Laiisez Faire* atau system mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat

pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat (Adisasmita, 2013).

Pertumbuhan penduduk yang semakin besar akan memperluas pasar dan perluasan pasar akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian. Sehingga secara tidak langsung perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Adam Smith mengatakan bahwa apabila pembangunan sudah berlangsung, maka proses pembangunan akan terus menerus berlangsung secara kumulatif (Adisasmita, 2013).

Sedangkan Ricardo dan Malthus berpendapat bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai *Stationary State* dimana perkembangan ekonomi tidak akan terjadi lagi. Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah dua kali lipatnya akan menyebabkan penurunan tingkat pembangunan ke taraf yang rendah, para pekerja akan menerima upah untuk hidup. Sesuai dengan hukum hasil lebih yang makin berkurang (*the law of diminishing returns*), yang artinya penambahan jumlah tenaga kerja akan berakibat yaitu tambahan hasil yang diperoleh setelah pada titik tertentu (Adisasmita, 2013).

Dalam analisis Neo Klasik laju pertumbuhan ekonomi tidak bergantung pada permintaan masyarakat akan tetapi tergantung pada pertumbuhan dan penawaran faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan Neo Klasik merupakan analisis yang berdasar dari teori klasik, sedangkan teori Harrod-Domar merupakan teori yang didasarkan dari teori Keynes. Kedua teori tersebut sangat bertentangan.

Dalam teori Harrod-Domar penanaman modal sangat diperlukan untuk meningkatkan keseluruhan pengeluaran masyarakat. Persoalan utama yang dianalisis dalam teori Harrod-Domar yaitu bahwa syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perekonomian yaitu alat-alat modal yang selalu bertambah dari masa ke masa.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan dapat menunjukkan suatu hubungan yang negatif maupun positif. Tahap pertama pembangunan ekonomi ekonomi akan mengalami tingkat perbedaan pembagian pendapatan yang semakin memburuk, kemudian stabil, dan pada akhirnya akan semakin membaik. Hal ini disebabkan oleh terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok menengah atas, kurang efektifnya pajak progresif, dan terjadinya akumulasi pemilikan modal (Hasibuan,1993).

Ketimpangan dalam hal pembagian pendapatan merupakan adanya ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar daerah, hal itu juga dapat menyebabkan ketimpangan antar pendapatan perkapita antar daerah (Kuncoro,2004). Dalam penelitian (Ngakan Putu dan Suyana, 2013) menyatakan bahwa pendapatan regional adalah salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu wilayah.

Dalam penelitian yang dilakukan Kuznet, menyimpulkan bahwa hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi sangat kuat. Pada awal pertumbuhan akan terjadi ketimpangan pendapatan hal itu terjadi karena belum meratanya pembagian pendapatan pada tiap-tiap daerah, akan tetapi dalam tahap lanjut ketimpangan akan semakin dapat teratasi. Menurut penelitian (Etik

Umiyati,2013) pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah menandakan pendapatan masyarakat secara keseluruhan dalam wilayah tersebut, yaitu nilai tambah (*value edit*) yang terjadi. Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dihitung berdasarkan harga berlaku, akan tetapi agar dapat terlihat pertumbuhan antar waktu ke waktu maka kemudian dihitung menggunakan nilai rill, artinya dinyatakan dengan harga konstan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi suatu daerah meningkat dengan baik maka ketimpangan pendapatan yang terjadi pada daerah tersebut dapat berkurang, karena pendapatan masyarakat yang diterima oleh masyarakat di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan, sehingga ketimpangan pendapatan pun dapat teratasi.

2.2.3 Hubungan Upah Minimum Regional dengan Ketimpangan Pendapatan

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya (Sumarsono,2003). Upah Minimum sebagaimana yang telah diatur dalam PP No. 8/1981 merupakan upah yang ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional, maupun Sub sektoral.

Pengupahan di Indonesia pada umumnya di dasarkan pada tiga fungsi upah, yaitu antara lain :

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja

Penetapan UMR dilakukan dengan melihat beberapa variabel diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, serta Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pekerja (Feriyanto, 2014). Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor industri yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Menurut teori Neo Klasik karyawan memperoleh upah senilai dengan hasil marginalnya. Untuk memaksimalkan keuntungan pengusaha memberikan imbalan kepada setiap faktor produksi sebesar nilai pertambahan hasil marginal masing-masing faktor produksi tersebut.

Perbedaan penerimaan pendapatan yang diterima masing-masing kelompok memang dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Peningkatan upah minimum hanya dapat dinikmati para buruh yang mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga buruh yang mempunyai kualitas lebih tinggi akan mendapatkan upah yang lebih tinggi, hal tersebut menyebabkan pendistribusian pendapatan menjadi tidak merata.

Yanthi dan Marhaeni (2015) menyebutkan bahwa kesejahteraan buruh/pekerja disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan buruh/pekerja sehingga tingkat kesejahteraan buruh/pekerja tersebut meningkat. Kenaikan upah akan menguntungkan pihak buruh/pekerja dan pengusaha karena adanya produktivitas kerja yang meningkat.

Kualitas buruh dan produktivitas buruh menjadi faktor penting bagi suatu masyarakat untuk menentukan bagaimana lapangan pekerjaan yang akan mereka peroleh. Kondisi lapangan pekerjaan nantinya juga akan berpengaruh dengan seberapa banyak pendapatan/upah yang akan diterima oleh setiap masyarakat. Bagi seorang buruh pendapatan yang mereka peroleh akan habis untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak mereka. Sedangkan pendapatan yang bagi seorang pengusaha suatu perusahaan besar akan habis mereka pergunakan untuk menambah pasar bagi perusahaan mereka, sehingga pendapatan yang nantinya mereka peroleh akan semakin meningkat banyak.

Musfidar (2012) menjelaskan bahwa perdebatan tentang upah minimum memang sering terjadi hal tersebut menyangkut tentang sejauh mana upah riil mengikuti pertumbuhan produktivitas, kebutuhan terhadap upah minimum. Pertama berkaitan dengan upaya mempertahankan daya saing industri padat karya, sementara yang kedua tentang upaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruh termasuk didalamnya dimensi pemerataan yang harus mengalami *trade-off* dengan tujuan pertumbuhan ekonomi. *Efficince wage theory* menjelaskan bahwa penetapan upah minimum memungkinkan bagi para tenaga kerja untuk

meningkatkan nutrisinya, dalam jangka panjang hal tersebut akan meningkatkan produktivitasnya.

Hasibuan (1993) Beberapa wilayah memperlihatkan tingkat upah rata-rata per hari yang relatif tinggi, akan tetapi koefisien variasinya relatif rendah, sementara beberapa wilayah tingkat upah per hari relatif rendah, tetapi koefisien variasinya relatif tinggi. Pertumbuhan upah bagi kalangan bawah merupakan suatu langkah untuk menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan pada suatu daerah. Dengan adanya peningkatan upah bagi kalangan bawah diharapkan perbedaan penerimaan upah yang terjadi antara kelompok bawah dengan kelompok tinggi dapat teratasi sehingga ketimpangan pendapatan dapat sedikit menurun.

Uraian diatas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara upah yang diterima oleh setiap masyarakat dengan ketimpangan pendapatan.

2.2.4 Hubungan Indeks Pembangunan Manusia dengan Ketimpangan Pendapatan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan akumulasi dari pengukuran perbandingan antara angka melek huruf, harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup dalam suatu Negara. IPM dapat mengukur bagaimana kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Masyarakat yang mempunyai produktivitas dan kualitas yang tinggi maka mereka dapat memenuhi segala kebutuhannya. Dengan kualitas dan produktivitas yang tinggi maka seseorang akan mendapatkan pekerjaan yang layak, pekerjaan tersebut akan mampu

memberikan pendapatan yang tinggi. Dengan pendapatan yang tinggi maka orang tersebut akan dapat memenuhi segala kebutuhannya.

IPM dapat diukur melalui tiga indikator yaitu tingkat kesehatan, tingkat pendidikan dan standar hidup. Sehingga bagi pemerintah apabila ingin meningkatkan IPM di daerahnya hendaknya memperhatikan tiga hal tersebut. Meningkatkan IPM dapat ditempuh melalui beasiswa, menjamin kesehatan dengan pengadaan kartu kesehatan, selain itu dapat ditempuh dengan faktor pendukung seperti halnya membuka lapangan kerja baru, meningkatkan jumlah investasi, memperbaiki infrastruktur. IPM yang berbeda pada tiap-tiap daerah menandakan produktivitas yang dimiliki masyarakat masing-masing daerah juga berbeda. Perbedaan ini akan berpengaruh pada pendapatan yang akan diterima masyarakat nantinya akan berbeda.

Todaro dan Smith (2011) menambahkan, IPM menunjukkan dengan jelas bahwa kesenjangan dalam pendapatan lebih besar daripada kesenjangan dalam indikator pembangunan yang lain, paling tidak dalam indikator kesehatan dan pendidikan. Seharusnya perbedaan IPM dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan, karena IPM menunjukkan seberapa besar produktivitas yang dimiliki masing-masing orang dalam suatu wilayah. Produktivitas yang tinggi berawal dari tingkat pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang tinggi akan menyebabkan kualitas yang dimiliki seseorang semakin tinggi. Dengan tingginya kualitas dan produktivitas maka orang tersebut layak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualitas yang dimiliki pada setiap masyarakat.

Pekerjaan yang layak akan memberikan pendapatan yang tinggi bagi masyarakat tersebut, sehingga perbedaan pendapatan dapat sedikit dapat teratasi.

Brata (2002) menyatakan bahwa peningkatan IPM pada suatu daerah yang tidak diikuti dengan peningkatan IPM pada daerah lainnya akan memicu terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan. Dari pernyataan diatas dapat dilihat bahwa perbedaan IPM mempengaruhi ketimpangan pendapatan pada daerah tersebut.

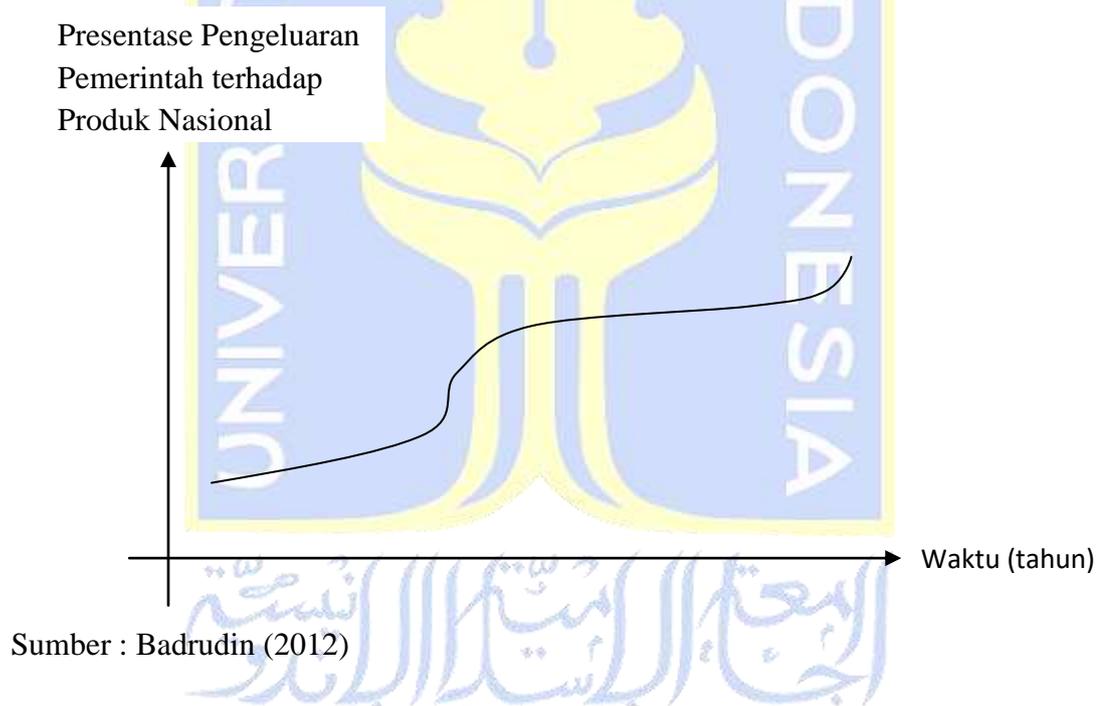
2.2.5 Hubungan antara Belanja Modal dengan Ketimpangan Pendapatan

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pengadaan atau pembangunan asset tetap yang terwujud yang memberi manfaat lebih dari satu tahun, dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dari pemerintah. Belanja modal merupakan bagian dari belanja langsung yang dikeluarkan oleh pemerintah, belanja modal dapat berupa pengeluaran yang digunakan untuk perbaikan infrastruktur, misalnya jalan raya, jalan tol, perbaikan gedung sekolah, kesehatan danlain-lain. Belanja modal dialokasikan guna untuk membiayai investasi pemerintah yang nantinya akan memberi manfaat kepada publik dan pemerintah melalui keuntungan yang diperoleh dari investasi.

Menurut Adolf Wagner dalam Badrudin (2012), produksi barang dan jasa dalam masyarakat dibedakan antara barang dan jasa kolektif dan barang dan jasa swasta. Barang dan jasa kolektif merupakan barang yang diproduksi oleh swasta yang disediakan oleh pemerintah, sehingga pemerintah membeli barang tersebut dari pihak swasta dengan atau tanpa menggunakan pajak. Barang dan jasa swasta

merupakan barang dan jasa yang disediakan oleh swasta yang dapat diproduksi oleh pemerintah.

Menurut Peacock-Wiseman pengeluaran pemerintah dari waktu ke waktu semakin meningkat karena semakin besarnya kegiatan pemerintah yang memerlukan pembiayaan. Peacock-Wiseman juga berpendapat bahwa pengeluaran negara tidak bersifat pertumbuhan yang berkelanjutan namun berbentuk seperti tangga rumah yang disebut oleh Peacock-Wiseman dengan *steplike* (Badrudin, 2012). *Steplike* dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2.2

Perkembangan Pola Pemerintah Pola *Steplike*

Pola *Steplike* memiliki 3 efek yang saling berhubungan erat. Pertama, *Displacement effect* merupakan kenaikan pengeluaran pemerintah dikarenakan

terdapat suatu masalah yang besar pada suatu negara dan kenaikan pengeluaran tersebut tidak disadari oleh masyarakat karena adanya toleransi dari masyarakat, misalnya tersadinya perang. Kedua, *Inspection effect* merupakan efek dari bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dari akibat terjadinya masalah/guncangan besar yang terjadi di suatu negara. Ketiga, *Concentration effect* merupakan efek yang berupa konsentrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah daerah atau sektor swasta.

Pemerintah harus berhati-hati dalam mengatur pengeluarannya, pengeluaran yang dilakukan harus dengan pertimbangan yang matang agar dapat memberikan hasil yang maksimal bagi seluruh masyarakat dan pemerintah. Besar kecilnya pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi besar kecilnya pendapatan nasional, hal tersebut tercantum dari persamaan $Y = C + I + G + (X - M)$.

Pengeluaran pemerintah melalui belanja modal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan dan investasi yang nantinya akan berdampak pada peningkatan pendapatan nasional. Membaiknya pembangunan seperti halnya infrastruktur akan menarik para investor untuk berinvestasi, investasi yang semakin meningkat akan memberi banyak keuntungan bagi suatu wilayah seperti halnya dengan meningkatnya investasi maka akan memberi banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang nantinya akan berdampak pada berkurangnya jumlah pengangguran, dan distribusi pendapatan akan semakin merata.

2.2.6 Hubungan antara Inflasi dengan Ketimpangan Pendapatan

Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara umum. Kenaikan harga yang terjadi bukan berarti setiap harga naik dengan presentase yang sama, jika kenaikan harga disuatu daerah terjadi hanya sementara dan tidak secara terus menerus tidak dapat dikatakan bahwa daerah tersebut mengalami inflasi. Beberapa penyebab terjadinya inflasi yang paling umum adalah, *Demand Pull Inflation* atau daya tarik permintaan dan *Cost Push Inflation* atau daya dorong penawaran. *Demand Pull Inflation* merupakan kenaikan harga yang disebabkan karena permintaan yang terlalu kuat pada suatu barang, kenaikan tersebut biasanya terjadi pada saat menjelang hari raya. Sedangkan, *Cost Push Inflation* kenaikan harga barang yang terjadi karena biaya produksi yang semakin mahal, penyebab dari biaya produksi yang semakin tinggi yaitu seperti depresiasi nilai tukar, inflasi luar negeri yang menjadi pusat perdagangan, naiknya harga komoditi.

Bagi sebagian kalangan yang mempunyai pendapatan tinggi tidak mempermasalahkan adanya inflasi, akan tetapi bagi kalangan yang mempunyai pendapatan dibawah rata-rata kenaikan inflasi akan menurunkan jumlah daya beli. Teori Kuantitas menjelaskan bahwa inflasi terjadi ketika kenaikan jumlah uang beredar, harga yang tinggi disebabkan karena tingginya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kenaikan inflasi memberi dampak pada kuantitas daya beli masyarakat, sebagian masyarakat memilih menurunkan jumlah konsumsinya ketika inflasi meningkat. Inflasi dalam suatu perekonomian negara sering

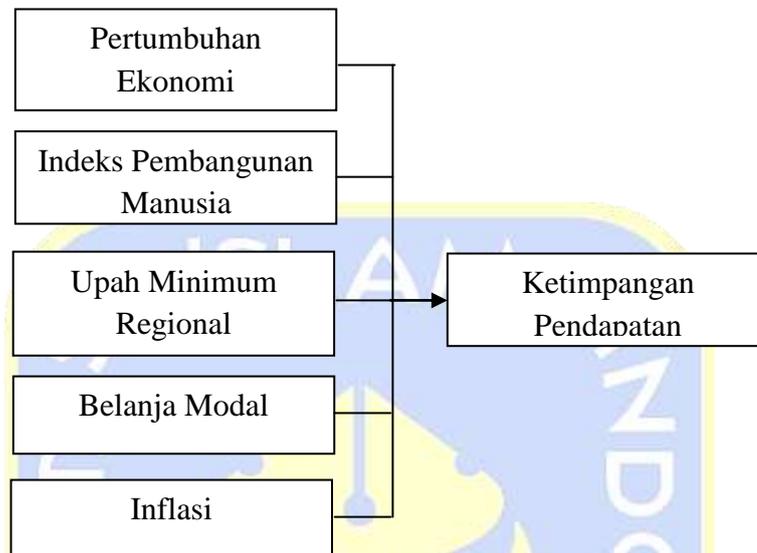
menjadi “simalakama”, karena inflasi dapat memberikan dampak positif, akan tetapi juga dapat memberikan dampak negatif (Prasetyo, 2009).

Inflasi dapat meningkatkan kesenjangan pendapatan yang terjadi disuatu wilayah, ketika masyarakat yang memiliki pendapatan menengah kebawah dan mereka hanya memiliki kekayaan yang berupa uang tunai, maka saat terjadi inflasi mereka akan semakin miskin karena nilai dan daya beli uang akan semakin menurun. Sedangkan bagi masyarakat berpendapatan menengah keatas inflasi akan memberikan keuntungan bagi mereka, karena orang kaya memiliki kekayaan yang tidak hanya uang tunai melainkan tanah, bangunan. Sehingga, ketika inflasi tinggi bangunan dan tanah akan meningkat nilai dan harganya. Hal tersebut akan menyebabkan yang kaya semakin kaya yang miskin akan bertambah miskin.

Tingkat inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan dimana inflasi mempengaruhi kinerja perusahaan disektor rill melalui penurunan laba akibat dari mahalnya biaya produksi serta penurunan daya beli masyarakat.



2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2.3
Kerangka Pemikiran Teoritis

2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara tentang hasil sementara dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Jawaban sementara dari hipotesis peneliti yaitu:

1. Diduga bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015.

2. Diduga bahwa variabel upah minimum regional berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015.
3. Diduga bahwa variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015.
4. Diduga bahwa variabel belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015.
5. Diduga bahwa variabel inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan bukan yang dihasilkan oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan gabungan data *Cross Section* dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan *Time Series* dari tahun 2010-2015. Data tersebut dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian sebelumnya maupun dari publikasi BPS Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun dan dalam beberapa judul publikasi seperti, Jawa Tengah dalam Angka, Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk, dan Indikator Kesejahteraan Rakyat Jawa Tengah.

3.2 Diskripsi Objek Penelitian

3.2.1 Ketimpangan Pendapatan

Data yang digunakan untuk menunjukkan ketimpangan pendapatan adalah menggunakan angka Gini Rasio Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah dengan judul “Indikator Sosial, Politik, dan Keamanan Jawa Tengah”.

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Data yang digunakan untuk menunjukkan Pertumbuhan Ekonomi adalah menggunakan data Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dengan tahun dasar 2000 untuk data tahun 2010, sedangkan tahun dasar 2010 untuk data tahun 2011-2015. Data pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam satuan persen (%), dan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang diambil melalui internet.

3.2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Data yang digunakan adalah menggunakan data indeks pembangunan manusia tahun 2010-2015 menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam satuan persen (%). Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah yang diambil melalui internet.

3.2.4 Upah Minimum Regional

Data yang digunakan dalam upah minimum regional diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2010-2015 dengan satuan ribu rupiah. Upah minimum regional menunjukkan patokan minimum upah yang dibayarkan kepada pekerja, upah minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan layak hidup.

3.2.5 Inflasi

Data inflasi diambil berdasarkan data tahunan yang di sajikan oleh Badan Pusat Statistik dari tahun 2010-2015 berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data inflasi dinyatakan dalam satuan persen (%).

3.3 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel (*pooled data*). Data panel merupakan data gabungan antara data *time series* dan *cross section*. Hal yang paling penting dalam melakukan analisis regresi data panel adalah pemilihan metode estimasi yang digunakan (Sriyana,2014). Terdapat tiga metode estimasi yang dapat digunakan untuk regresi data panel, yaitu model *common effects*, model *fixed effects*, dan model *random effects*.

a. Model *common effects*

Model *common effect* mengasumsikan bahwa intersep dan slope selalu tetap baik antar waktu maupun antar individu. Setiap individu diuji untuk mengetahui bagaimana hubungan antara variabel dependen terhadap variabel independen. Dasar yang digunakan dalam regresi model ini dengan mengabaikan pengaruh individu dan waktu pada model yang dibentuknya, sehingga nantinya akan memberikan nilai intersep dan slope dengan sama besarnya.

Regresi dengan menggunakan model *common effect* diperoleh dengan cara menggabungkan antara data *time series* dan data *cross section* kedalam data panel (*pooled data*), kemudian diregresi menggunakan metode OLS. Model tersebut menguji dengan menggunakan pendekatan yang mengabaikan dimensi individu maupun waktu yang mungkin saja saling berpengaruh, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat diketahui perbedaannya baik antar individu maupun antar waktu.

Dari ketiga metode estimasi yang telah disebutkan diatas model *common effect* merupakan metode yang paling mudah digunakan. Hal tersebut dikarenakan regresi yang digunakan cukup sederhana dan mudah untuk dibentuk dengan bantuan aplikasi komputer.

b. Model Fixed Effect

Konsep dasar regresi dari model ini adalah meminimalkan nilai residual. Perbedaan pada tiap obyek yang akan dianalisis sangat mungkin terjadi, bahkan kondisi satu obyek pada suatu waktu tertentu akan sangat berbeda dengan kondisi obyek pada waktu yang lain. Hal tersebut sangat umum terjadi pada data-data ekonomi yang akan dianalisis nantinya, sehingga membutuhkan model yang dapat menunjukkan perbedaan konstanta antar obyek, meskipun dengan koefisien regresi yang sama.

Permasalahan dalam model ini adalah masih mempunyai beberapa kelemahan dalam meregresi suatu data. Kelemahan tersebut adalah bahwa model *fixed effect* masih terdapat kemungkinan ketidaksesuaian model dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemungkinan lain yang terjadi adalah perbedaan intersep maupun slope baik antar individu maupun antar waktu mungkin akan ditemukan apabila meregresi dengan menggunakan metode tersebut. Sehingga diperlukan suatu model yang dapat menunjukkan perbedaan intersep yang mengasumsikan adanya perbedaan baik antar objek maupun antar waktu.

c. Model Random Effect

Model *random effects* merupakan alternatif solusi jika *fixed effects* tidak tepat. Pada model *fixed effects* perbedaan intersep dan slope hasil dari perbedaan

antar individu dan antar waktu secara langsung, sedangkan pada *random effects* perbedaan tersebut diakomodasi melalui *error* (Sriyana,2014).

Ketika menganalisis dengan metode efek random harus memperhatikan ketentuan yang berlaku, yaitu bahwa ketika menganalisis sebanyak 4 variabel (independen atau dependen) maka minimal harus ada 4 objek data *cross section*. Apabila ketentuan tersebut tidak dilakukan maka koefisien efek random tidak dapat diestimasi, atau dapat menghasilkan angka nol.

Terdapat beberapa teknik dalam menentukan model estimasi mana yang terbaik dari ketiga model tersebut. Langkah yang paling baik adalah dengan melakukan pengujian untuk memilih model yang terbaik. Cara lain dapat dilihat melalui data panel yang ada, apabila mempunyai jumlah periode waktu (T) yang lebih besar daripada dengan jumlah individu (N) maka lebih baik digunakan adalah model *fixed effects*, sebaliknya jika jumlah data panel yang ada mempunyai jumlah periode waktu (T) lebih kecil dibanding jumlah individu (N) maka model yang lebih baik digunakan adalah *random effects* (Sriyana,2014).

Maka bentuk regresi data panel untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$KP = \beta_0 + \beta_1 PE_{1it} + \beta_2 UMK_{2it} + \beta_3 IPM_{3it} + \beta_4 BM_{4it} + \beta_5 IF_{5it} + \varepsilon$$

Dimana :

KP = Ketimpangan pendapatan Kabupaten i tahun t

β_0 = Konstanta

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5$ = Koefisien variable independen

- PE_{1it} = Pertumbuhan ekonomi Kabupaten i tahun t (persen)
- UMK_{2it} = Upah minimum kabupaten Kabupaten i tahun t (rupiah)
- IPM_{3it} = Indeks pembangunan manusia Kabupaten i tahun t (persen)
- BM_{4it} = Belanja modal Kabupaten i tahun t (rupiah)
- IF_{5it} = Inflasi Kabupaten i tahun t (persen)

Dalam penelitian kali ini terdapat perbedaan dalam satuan dan besaran variabel bebas dalam persamaan regresi harus dibuat dengan model logaritma natural. Alasan pemilihan model logaritma natural menurut Ghozali (2005) adalah sebagai berikut :

- a. Menghindari adanya heteroskedastisitas
- b. Mengetahui koefisien yang menunjukkan elastisitas dan,
- c. Mendekatkan skala data.

Dalam model penelitian ini logaritma yang digunakan adalah dalam bentuk semilog linear (semi-log). Dimana semi-log mempunyai beberapa keuntungan diantaranya :

- a. Koefisien model semi-log mempunyai interpretasi yang sederhana
- b. Model semi-log sering mengurangi masalah statistik umum yang dikenal sebagai heteroskedastisitas,
- c. Model semi-log mudah dihitung .

Sehingga bentuk regresi data panel dengan menggunakan model semi log menjadi sebagai berikut :

$$KP = \beta_0 + \beta_1 PE_{1it} + \beta_2 \text{LogUMK}_{2it} + \beta_3 IPM_{3it} + \beta_4 \text{LogBM}_{4it} + \beta_5 IF_{5it} + \varepsilon$$

3.3.1 Pemilihan Model Data Panel

3.3.1.1 Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji Chow)

Uji F statistik atau uji chow merupakan pengujian antara *common effect* dan model *fixed effect*. Uji signifikansi *fixed effect* dilakukan dengan melakukan uji F statistik, melalui uji F maka akan diperoleh hasil apakah memilih *common effect* ataukah memilih *fixed effect* (Sriyana,2014).

Ketika nilai F statistic lebih besar dibandingkan nilai F-tabel maka pada tingkat signifikansi tertentu (asumsi tingkat signifikansi α 5%) maka model *fixed effect* lebih baik untuk digunakan dibandingkan model *common effect*. Selain melihat nilai F statistik dalam menentukan model yang baik digunakan, dapat melalui membandingkan antara F-statistik dengan tingkat signifikansi α . Apabila $p < \alpha$ maka model yang lebih baik digunakan untuk pengujian adalah model *fixed effect*, begitupun sebaliknya.

3.3.1.2 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk menguji apakah model yang baik digunakan adalah *fixed effect* atau *random effect*. Uji hausman dilakukan dengan cara mengestimasi nilai m menggunakan rumus sebagai berikut :

$$m = \hat{q}\text{Var}(\hat{q})^{-1}\hat{q}$$

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara H_0 dan H_a , dimana H_0 menunjukkan bahwa model yang baik untuk digunakan adalah model *random effect*, sedangkan H_a menunjukkan bahwa model yang baik untuk digunakan adalah model *fixed effect*. Menolak H_0 ketika nilai $p < \alpha$ dengan asumsi derajat signifikansi α 5%, begitupun sebaliknya.

3.3.1.3 Uji Langrange Multipler (LM)

Uji Langrange Multipler digunakan untuk menentukan model mana yang lebih baik digunakan antara *random effect* dengan *common effect* pada pendekatan *common effect*. Metode *Bruesch* merupakan formulasi yang digunakan dalam menggunakan uji Langrange Multipler, adapun rumus *Bruesch* sebagai berikut :

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n [\sum_{t=1}^T e_{it}]^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T - \bar{e}_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2$$

Dimana :

n : Jumlah individu

T : Jumlah periode waktu

e : residual dengan metode *common effect*

Maka akan diperoleh hasil akhir yaitu, apabila nilai statistik LM > nilai kritis chi-square maka metode yang dipilih adalah model *random effect*, begitupun sebaliknya.

3.3.2 Pengujian Statistik

3.3.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan proporsi atau presentase dari total variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Widarjono, 2013). Koefisien determinasi dapat ditulis menggunakan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{TSS - SSR}{TSS}$$
$$R^2 = 1 - \frac{ESS}{TSS}$$
$$= 1 - \frac{\sum \hat{e}_i^2}{\sum (Y_i - \bar{Y})^2}$$

Koefisien determinasi akan semakin meningkat dengan menambah variabel independennya, dilihat dari rumus diatas yang menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi tidak akan berkurang terhadap variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada pada angka 0 hingga 1, ketika nilai mendekati angka 1 maka variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen secara baik. Seperti halnya ketika R^2 menunjukkan angka 0,9899 artinya, variabel dependen dapat dijelaskan variabel independen sebesar 98,99%.

Koefisien determinasi yang rendah bukan berarti variabel dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen yang sudah kita pilih. Koefisien determinasi yang rendah mungkin saja dapat terjadi, dalam kasus data *time series* seringkali akan mendapatkan nilai R^2 yang terjadi hal tersebut terjadi karena data runtut waktu diduga mempunyai tren yang bergerak kearah yang sama. Sedangkan dalam data *cross section* sering kali mendapatkan nilai R^2 yang rendah hal tersebut terjadi karena terdapat variasi yang besar antar variabel yang diteliti pada periode yang sama (widarjono, 2013).

3.3.2.2 Uji t (Koefisien Regresi Individual)

Uji t atau bisa juga disebut uji parsial merupakan pengujian untuk melihat bagaimana pengaruh variabel independen secara individu mempengaruhi variabel dependen. uji t dapat dilakukan dengan beberapa tahapan baku yaitu menyusun hipotesis statistik, menentukan derajat kesalahan (α), menemukan nilai t kritis, dan menentukan keputusan uji hipotesis (Sriyana, 2014). Adapun hipotesis untuk uji t sebagai berikut :

1. Uji hipotesis positif satu sisi

$$H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_0 : \beta_1 > 0$$

2. Uji hipotesis negatif satu sisi

$$H_0 : \beta_1 \geq 0$$

$$H_0 : \beta_1 < 0$$

3. Uji dua sisi

$$H_0: \beta_1 \leq 0$$

$$H_0: \beta_1 > 0$$

Dengan asumsi menggunakan $\alpha = 5\%$

Keputusan untuk menentukan hasil akhir :

1. Jika nilai t statistik $> \alpha = 5\%$ maka H_0 diterima atau menolak H_a , artinya variabel bebas tidak mempengaruhi variabel terkait secara signifikan.
2. Jika t statistik $< \alpha = 5\%$ maka H_0 ditolak atau menerima H_a , artinya variabel bebas mempengaruhi variabel terkait secara signifikan.

3.3.2.3 Uji F (Koefisien Regresi Menyeluruh)

Uji F atau bisa juga disebut uji serentak merupakan uji untuk menunjukkan bagaimana variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi variabel terkait. Untuk menguji apakah koefisien β_1 dan β_2 secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (Widarjono,2013), maka langkah untuk melakukan uji F adalah sebagai berikut :

1. Membuat hipotesis

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait.

$H_0 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$, berarti terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terkait.

2. Mencari nilai F hitung dan signifikansi F (sig-F), dengan asumsi $\alpha = 5\%$

3. Menentukan keputusan akhir yaitu :

a. Ketika $\text{sig-F} > \alpha = 5\%$ maka menerima H_0 , artinya variabel bebas secara bersama-sama atau secara serentak tidak mempengaruhi variabel terkait secara signifikan.

b. Ketika $\text{sig-F} < \alpha = 5\%$ maka ditolak H_0 , artinya variabel bebas secara bersama-sama atau secara serentak variabel bebas mempengaruhi variabel terkait secara signifikan.



BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

4.1 Diskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data *time series* dan data *cross section* dengan objek 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015. Variabel independen yang digunakan yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), Belanja Modal (BM), Inflasi (IF), sedangkan variabel dependennya adalah Ketimpangan Pendapatan dengan menggunakan ukuran Gini Rasio.

Analisis ini menggunakan *Eviews 8* sebagai alat bantu untuk menganalisis secara ekonometrik.

4.2 Hasil dan Analisis Uji Regresi Data Panel

4.2.1 Pemilihan Model dalam Pengolahan data

Pemilihan model ini sangat diperlukan untuk menentukan model mana yang terbaik berdasarkan pengujian secara statistik, guna menemukan dugaan yang tepat sesuai dengan teori. Sehingga, diperlukan untuk melihat model yang ada dalam data panel seperti yang ada dibawah ini :

1. *Chow Test* (Uji F-Statistik)

Uji ini digunakan untuk memilih model mana yang akan digunakan antara model estimasi *Common Effect* atau model *Fixed Effect*, dengan uji hipotesis sebagai berikut :

- a. H_0 : memilih model estimasi *Common Effect*
- b. H_1 : memilih model estimasi *Fixed Effect*

Uji F-statistik ini akan dianalisis dengan melihat nilai probabilitas F-statistik. Apabila probabilitas F-statistik tidak signifikan atau $\alpha > 5\%$, maka model yang dipilih adalah model estimasi *Common Effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas F-statistik signifikan atau $\alpha < 5\%$, maka model yang dipilih adalah model estimasi *Fixed Effect*.

Tabel 4.1
Hasil Uji Signifikansi *Fixed Effect*

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.563591	(34,169)	0.0000
Cross-section Chi-square	136.131107	34	0.0000

Sumber : evIEWS8, diolah

Dari hasil uji signifikansi *fixed effect* diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 atau $\alpha < 5\%$, artinya menolak H_0 dan memilih H_1 . Hal tersebut menunjukkan bahwa model estimasi yang dipilih adalah model *Fixed Effect*.

2. Uji Hausman

Uji ini digunakan untuk memilih model mana yang akan digunakan antara model estimasi *Fixed Effect* atau model *Random Effect*, dengan uji hipotesis sebagai berikut :

- a. H_0 : memilih model estimasi *Random Effect*
- b. H_1 : memilih model estimasi *Fixed Effect*

Uji hausman akan dianalisis dengan melihat nilai probabilitas *Chi Square Statistic*. Apabila probabilitas *Chi Square Statistic* tidak signifikan atau $\alpha > 5\%$, maka model yang dipilih adalah model estimasi *Random Effect*. Sebaliknya, jika nilai probabilitas *Chi Square Statistic* signifikan atau $\alpha < 5\%$, maka model yang dipilih adalah model estimasi *Fixed Effect*.

Tabel 4.2

Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	33.013885	5	0.0000

Sumber : eviews8, diolah

Dari hasil uji Hausman diperoleh nilai sebesar 33,013885 dengan probabilitas sebesar 0,0000 atau $\alpha < 5\%$, artinya menolak H_0 dan memilih H_1 . Hal tersebut menunjukkan bahwa model estimasi yang dipilih adalah menggunakan model *Fixed Effect*.

4.2.2 Hasil Pengujian Statistik

Berdasarkan hasil uji spesifikasi model dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman dihasilkan bahwa keduanya memilih model *fixed effect*, maka penulis memutuskan bahwa model yang tepat untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah adalah model *Fixed Effect*. Hasil estimasi dari Fixed Effect adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3

Hasil Estimasi *Fixed Effect*

Dependent Variable: KP
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/14/17 Time: 15:29
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (unbalanced) observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.002087	0.163580	0.012756	0.9898
PE	0.001247	0.003025	0.412323	0.6806
IPM	0.029199	0.005114	5.709472	0.0000
LOG_UMR	-0.154035	0.031151	-4.944744	0.0000
LOG_BM	0.023487	0.005422	4.332061	0.0000
IF	-0.002371	0.000807	-2.938366	0.0038

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.648552	Mean dependent var	0.321627
Adjusted R-squared	0.567448	S.D. dependent var	0.040123
S.E. of regression	0.026388	Akaike info criterion	-4.261457
Sum squared resid	0.117681	Schwarz criterion	-3.621776
Log likelihood	485.3223	Hannan-Quinn criter.	-4.002830
F-statistic	7.996602	Durbin-Watson stat	2.087164
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : eviews8, diolah

4.2.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen, untuk penelitian kali ini koefisien detreminasi menunjukkan seberapa besar variabel dependen yaitu Ketimpangan Pendapatan (KP) dapat dijelaskan oleh variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), Belanja Modal (BM), dan Inflasi (IF).

Dari hasil regresi model *Fixed Effect* diperoleh nilai R^2 sebesar 0.648552, artinya bahwa variabel dependen KP dapat dijelaskan oleh variabel independen PE, IPM, UMR, BM dan IF sebesar 64,8% dan sisanya sebesar 35,2% dijelaskan oleh variabel lain selain variabel yang telah digunakan diluar model.

4.2.2.2 Pengujian Signifikansi Parameter Individu (Uji t)

Pengujian signifikansi parameter individu merupakan uji signifikansi untuk masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen signifikan atau tidak signifikan terhadap variabel dependen dapat dilihat pada pengujian ini. Pengujian signifikansi masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap Variabel Pertumbuhan Ekonomi
 - a. $H_0 : \beta_i \geq 0$, artinya variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

- b. $H_1 : \beta_i < 0$, artinya variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Dari hasil regresi *fixed effect* (Tabel 4.3) dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), variabel pertumbuhan ekonomi (PE) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,6806 ($> 5\%$) dengan t-hitung sebesar 0,412323, artinya menolak H_1 atau menerima H_0 . Secara statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

2. Pengujian terhadap Variabel Indeks Pembangunan Manusia
- a. $H_0 : \beta_i \geq 0$, artinya variabel indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- b. $H_1 : \beta_i \leq 0$, artinya variabel indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Dari hasil regresi *fixed effect* (Tabel 4.3) dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), variabel indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 5\%$) dengan t-hitung sebesar 5,709472, artinya menolak H_0 atau menerima H_1 . Secara statistik menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

3. Pengujian terhadap Upah Minimum Regional

- a. $H_0 : \beta_i \geq 0$, artinya variabel upah minimum regional tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- b. $H_1 : \beta_i \leq 0$, artinya variabel upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Dari hasil regresi *fixed effect* (Tabel 4.3) dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), variable indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 5\%$) dengan t-hitung sebesar -4,944744, artinya menolak H_0 atau menerima H_1 . Secara statistik menunjukkan bahwa upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

4. Pengujian terhadap Belanja Modal

- a. $H_0 : \beta_i \geq 0$, artinya variabel belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- b. $H_1 : \beta_i \leq 0$, artinya variabel belanja modal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Dari hasil regresi *fixed effect* (Tabel 4.3) dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), variable indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 ($< 5\%$) dengan t-hitung sebesar 4,332061, artinya menolak H_0 atau menerima H_1 . Secara statistik menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh

signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

5. Pengujian terhadap Variabel Inflasi

- a. $H_0 : \beta_i \geq 0$, artinya variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
- b. $H_1 : \beta_i \leq 0$, artinya variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Dari hasil regresi *fixed effect* (Tabel 4.3) dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 5\%$), variable indeks pembangunan manusia (IPM) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0038 ($< 5\%$) dengan t-hitung sebesar -2,938366, artinya menolak H_0 atau menerima H_1 . Secara statistik menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.2.3 Pengujian Signifikansi Simultan (Uji F)

Pengujian signifikansi simultan (uji F) merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. F-hitung pada regresi *fixed effect* (Tabel 4.3) menunjukkan nilai sebesar 7,996602, dengan probabilitas sebesar 0,0000 ($< \alpha = 5\%$). Artinya bahwa variabel independen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (PE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Upah Minimum Regional (UMR), Belanja Modal (BM), dan Inflasi (IF) secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel dependen yaitu Ketimpangan Pendapatan (KP).

4.2.3 Analisis Persamaan Koefisien dan Intersep Pembeda

4.2.3.1 *Cross Effect*

Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana intersep yang dimiliki oleh masing-masing *cross section* pada setiap Kabupaten/Kota memiliki perbedaan dalam mempengaruhi variabel bebas untuk menurunkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.4
Intersep *Cross Effect* Lima Teratas

Kabupaten/Kota	Intersep	Koefisien	Konstanta
Kabupaten Banjarnegara	0,164920	0,002087	0,167007
Kabupaten Brebes	0,159594	0,002087	0,161681
Kabupaten Pemasang	0,139615	0,002087	0,141702
Kabupaten Wonosobo	0,135935	0,002087	0,138022
Kabupaten Blora	0,131262	0,002087	0,133349

Sumber : Eviews 8, diolah

Pada tabel 4.4 diatas menunjukkan hasil penjumlahan antara intersep dan koefisien, sehingga diperoleh hasil dimana lima Kabupaten yang memiliki konstanta paling tinggi yaitu Kabupaten Banjarnegara sebesar 0,167007, Kabupaten Brebes sebesar 0,161681, Kabupaten Pemasang sebesar 0,141702, Kabupaten Wonosobo sebesar 0,138022, dan terakhir Kabupaten Blora 0,133349. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Masalah yang dihadapi pada 5 kabupaten tersebut adalah masih rendahnya IPM, masalah kesehatan, dan pendidikan yang masih rendah. Seperti halnya di Kabupaten Brebes masalah yang masih dihadapi adalah IPM yang masih rendah karena terkendala luas wilayah dan jumlah penduduk yang tinggi. Akan tetapi pendidikan di Kabupaten Brebes sudah cukup baik hanya saja masih ada beberapa Kecamatan yang masih terdapat lulusan SD. Sedangkan di Kabupaten Banjarnegara masalah yang dihadapi adalah kesehatan yang masih rendah, seperti akses pelayanan kesehatan yang masih sulit.

Selain itu terdapat 5 Kabupaten/Kota dengan konstanta rendah yang berarti variabel tidak dapat menurunkan keimpangan di wilayah tersebut karena terdapat masalah lain diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.5

Intersep *Cross Effect* Lima Terbawah

Kabupaten/Kota	Intersep	Koefisien	Konstanta
Kota Surakarta	-0,27377	0,002087	-0,27169
Kota Salatiga	-0,27145	0,002087	-0,26936
Kota Semarang	-0,2636	0,002087	-0,26152
Kota Magelang	-0,16982	0,002087	-0,16774
Kabupaten Sukoharjo	-0,11741	0,002087	-0,11532

Sumber : eviews 8, diolah

Pada tabel 4.5 menunjukkan konstanta dengan perolehan hasil lima terendah, lima Kabupaten/Kota tersebut antara lain Kota Surakarta sebesar -0,27169, Kota Salatiga sebesar -0.26936, Kota Semarang sebesar -0,26152, Kota Magelang sebesar -0,16774, dan yang terakhir Kabupaten Sukoharjo sebesar -0,11532. Dari hasil tersebut diasumsikan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini tidak dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

Masalah yang di hadapi lima Kabupaten/Kota diatas adalah meningkatnya jumlah penduduk yang meningkat yang menyebabkan munculnya lingkungan pinggiran yang menjadikan lingkungan menjadi kumuh. Hal tersebut dikarenakan banyaknya penduduk desa yang hendak mencari pekerjaan di daerah perkotaan akan tetapi tidak mempunyai tempat tinggal di Kota. Dari masalah tersebut menyebabkan variabel yang digunakan tersebut tidak membuat penurunan masalah ketimpangan di wilayah tersebut.

4.2.3.1 *Period Effect*

Intersep yang dihasilkan pada setiap *time series* memiliki pengaruh yang berbeda-beda, sehingga analisis *period effect* ini akan menentukan bahwa pada tahun berapa seluruh variabel independen mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 4.6

Intersep *Period Effect*

Tahun	Intersep	Koefisien	Konstanta
2010	-0,05582	0,002087	-0,053733
2011	0,008466	0,002087	0,010553
2012	0,016338	0,002087	0,018425
2013	-0,00204	0,002087	0,000047
2014	0,007024	0,002087	0,009111
2015	0,026031	0,002087	0,028118

Sumber : eviews 8, diolah

Tabel 4.6 menunjukkan hasil dari penjumlahan intersep dengan koefisien dengan perolehan hasil konstanta sebesar -0,053733 pada tahun 2010, tahun 2011 sebesar 0,010553, tahun 2012 sebesar 0,018425, tahun 2013 sebesar 0,000047, tahun 2014 sebesar 0,009111, dan tahun 2015 sebesar 0,028118..

4.2.4 Interpretasi Hasil dan Analisis

4.2.4.1 Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dari hasil estimasi *fixed effect* (Tabel 4.3) pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa

pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan negatif dan signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

Dalam Todaro & Smith (2011) menjelaskan masalah yang terjadi bukan hanya soal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi siapa saja yang akan berkontribusi untuk menumbuhkannya, apakah sebagian kecil orang atau banyak orang. Apabila peningkatan hanya dilakukan oleh sebagian orang yang merupakan berpendapatan tinggi, maka peningkatan yang terjadi akan memberikan banyaak manfaat bagi bagi mereka. Akan tetapi jika pertumbuhan dihasilkan oleh banyak orang, maka mereka pula yang akan ikut merasakan manfaatnya, sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih merata. masalah yang sering terjadi adalah ketika pertumbuhan ekonomi tidak memberikan manfaat bagi orang miskin, sehingga menyebabkan memburuknya ketimpangan dan kemiskinan.

Dalam penelitian Rosyadi menjelaskan penyebab pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan adalah saat pertumbuhan ekonomi meningkat namun pemerataan pembangunan tidak dirasakan oleh seluruh kalangan. Pertumbuhan hanya mengurangi ketimpangan di tahap awal pembangunan, untuk tahap berikutnya pertumbuhan yang meningkat tidak beriringan dengan pemerataan pembangunan yang merata. Sehingga, ketika pertumbuhan ekonomi meningkat tidak memberikan pengaruh apapun terhadap ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak memberikan pengaruh secara

langsung terhadap ketimpangan karena ukuran perhitungannya tidak berdasarkan pendapatan personal.

4.2.4.2 Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dilihat dari hasil estimasi model *fixed effect* (Tabel 4.3) indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah. Dilihat dari koefisien indeks pembangunan manusia sebesar 0,029199, artinya bahwa apabila indeks pembangunan manusia naik 1% maka ketimpangan pendapatan naik sebesar 0,029199%. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Menurut penelitian Brata (2002) bahwa peningkatan IPM pada suatu daerah tetapi tidak diikuti dengan peningkatan IPM pada daerah lainnya akan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Peningkatan kualitas penduduk jika peningkatan tersebut tidak merata maka akan menyebabkan ketimpangan pendapatan makin memburuk, karena hanya daerah yang memiliki kualitas penduduk paling tinggi yang memiliki pendapatan yang tinggi pula. Indeks pembangunan manusia akan terus meningkat seiring meningkatnya pendapatan per kapita, karena masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi, kesehatan baik akan terus dapat mengakses lebih banyak dibidang pendidikan dan kesehatan. Pada akhirnya yang dapat mengakses pendidikan dan kesehatan tersebut adalah masyarakat

yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Perbedaan jenjang sekolah, kualitas pembelajaran sekolah, dan angka partisipasi sekolah dapat mempengaruhi kualitas masyarakat, karena dengan pendidikan yang tinggi merupakan modal manusia yang nanti mempertinggi produktivitas.

Perbedaan kualitas masyarakat nantinya akan menghasilkan perbedaan produktivitas masyarakat yang nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

4.2.4.3 Analisis Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Ketimpangan Pendapatan

Hasil estimasi model *fixed effect* (Tabel 4.3) menunjukkan hubungan antara upah minimum regional dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien sebesar -0,154035, artinya ketika upah minimum regional naik sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan akan turun sebesar 0,154035%. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa upah minimum regional berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Musfidar (2012) yang mengatakan bahwa upah minimum berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Upah merupakan penghasilan dari pekerja yang mempunyai pengaruh penting terhadap ketimpangan pendapatan. Tingkat pendapatan memang mempunyai pengaruh penting, akan tetapi ukuran tersebut tidak selalu dapat dijadikan untuk melihat suatu kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Adakalanya suatu wilayah yang memiliki pendapatan

menengah terdapat masyarakat yang hidup didalam kemiskinan. Kenaikan upah minimum juga dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan pada suatu wilayah meningkat, apabila kenaikan tersebut terjadi secara drastis hanya pada wilayah tertentu sedangkan untuk beberapa wilayah tidak menaikkan upah minimum regionalnya.

Upah yang tinggi akan menyebabkan daya beli bertambah dan kalangan menengah bawah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Peningkatan upah akan nantinya akan mempengaruhi para buruh untuk dapat menyekolahkan anaknya dan memberikan nutrisi yang lebih naik lagi, yang nantinya akan berpengaruh terhadap produktivitas di masa depan, dari kenaikan upah tersebut maka akan menyeimbangkan pendapatan antara kaum buruh dan pekerja lainnya . Kenaikan upah minimum juga dapat menghambat terjadinya migrasi bagi masyarakat kalangan bawah, salah satu faktor terjadinya migrasi karena ingin mendapatkan pekerjaan dengan upah yang cukup tinggi.

Upah minimum regional ditetapkan dengan mengacu pada kebutuhan layak hidup, semakin tinggi angka kebutuhan layak hidup suatu wilayah maka akan semakin tinggi pula upah minimum ditetapkan. Pemertintah selalu mengatur sedemikian rupa agar kenaikan upah tidak menyebabkan ketimpangan pendapatan semakin memburuk, sehingga kebijakan pemerintah melalui kenaikan upah minimum setiap tahunnya dapat menurunkan ketimpangan pendapatan.

4.2.4.4 Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Ketimpangan Pendapatan

Pengaruh belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui estimasi dari model *fixed effect* (Tabel 4.7), hubungan belanja modal dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh positif signifikan. Dilihat dari koefisien belanja modal sebesar 0,023487, artinya bahwa ketika belanja modal naik sebesar 1% maka ketimpangan pendapatan naik sebesar 0,023487%. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang mengatakan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan atau ketika belanja modal naik maka ketimpangan pendapatan seharusnya turun.

Belanja modal merupakan gambaran dari pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk perbaikan sarana prasarana. Pengeluaran belanja modal seharusnya dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Perbaikan sarana dan prasarana dapat berupa perbaikan jalan raya, gedung kesehatan, gedung pendidikan, dll. Dengan adanya perbaikan sarana prasarana seharusnya dapat meningkatkan investasi yang nantinya akan meningkatkan pembangunan, sehingga ketimpangan dapat sedikit teratasi. Masalah yang muncul adalah saat perbaikan sarana dan prasarana seperti jalan raya, tidak semua orang dapat mengakses jalan tersebut yang hanya dapat menikmati adalah orang-orang yang memiliki pendapatan menengah atas. Perbaikan jalan yang tidak merata juga merupakan salah satu penyebab, karena dengan jalan yang bagus di

beberapa wilayah seperti halnya daerah kota maka akan menyebabkan para investor berlari untuk berinvestasi di daerah kota saja.

Permasalahan utamanya adalah ketika belanja modal dikeluarkan secara tidak merata untuk masing masing wilayah maka hal yang akan terjadi adalah ketimpangan akan semakin memburuk. Hal tersebut yang menyebabkan belanja modal di Provinsi Jawa Tengah berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan.

4.2.4.5 Analisis Pengaruh Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan

Dilihat dari hasil estimasi *fixed effect* (Tabel 4.3) menunjukan hubungan antara inflasi dengan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif signifikan dengan koefisien sebesar $-0,002371$, artinya bahwa ketika inflasi naik 1% maka ketimpangan pendapatan turun sebesar $0,002371\%$. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.

Peningkatan inflasi terkadang tidak memberi dampak terhadap daerah yang inflasinya masih tergolong rendah seperti halnya Provinsi Jawa Tengah, peningkatan inflasi justru dapat memicu masyarakat untuk semakin membuka usaha yang nantinya menyebabkan meningkatnya lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya lapangan pekerjaan maka pengangguran disuatu daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah akan berkurang, sehingga ketimpangan pendapatan akan semakin menurun.

Pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan sebenarnya tergantung pada kondisi awal inflasi, apabila kondisi awal inflasi rendah maka inflasi akan berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Dalam buku Sadono (2006) mengatakan bahwa inflasi menyebabkan penurunan pendapatan riil para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri, pegawai perusahaan swasta, dan para pensiunan.

Menurut data inflasi Provinsi Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota tahun 2009-2016, inflasi awal rata-rata menunjukkan angka 3,00%. Pada tahun 2013 angka inflasi mencapai angka 8,00% hingga 10,00%, hal tersebut berdampak pada naiknya ketimpangan pendapatan yang dilihat dari naiknya gini rasio Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 sebesar 0,39.

Pengaruh inflasi terhadap ketimpangan pendapatan dapat berpengaruh negatif maupun positif tergantung kondisi awal inflasi, apabila kondisi awal inflasi tinggi maka akan berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan, begitupun sebaliknya.

BAB V

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Pengujian ini dimaksudkan untuk menguji bagaimana pengaruh antara Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Regional, Belanja Modal, Inflasi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2010-2015. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab IV maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Variabel indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, artinya ketika semakin tinggi presentase indeks pembangunan manusia, maka tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui angka gini rasio juga akan meningkat.
3. Variabel upah minimum regional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, artinya saat jumlah upah minimum naik, maka akan menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Variabel Belanja Modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, artinya ketika jumlah pengeluaran

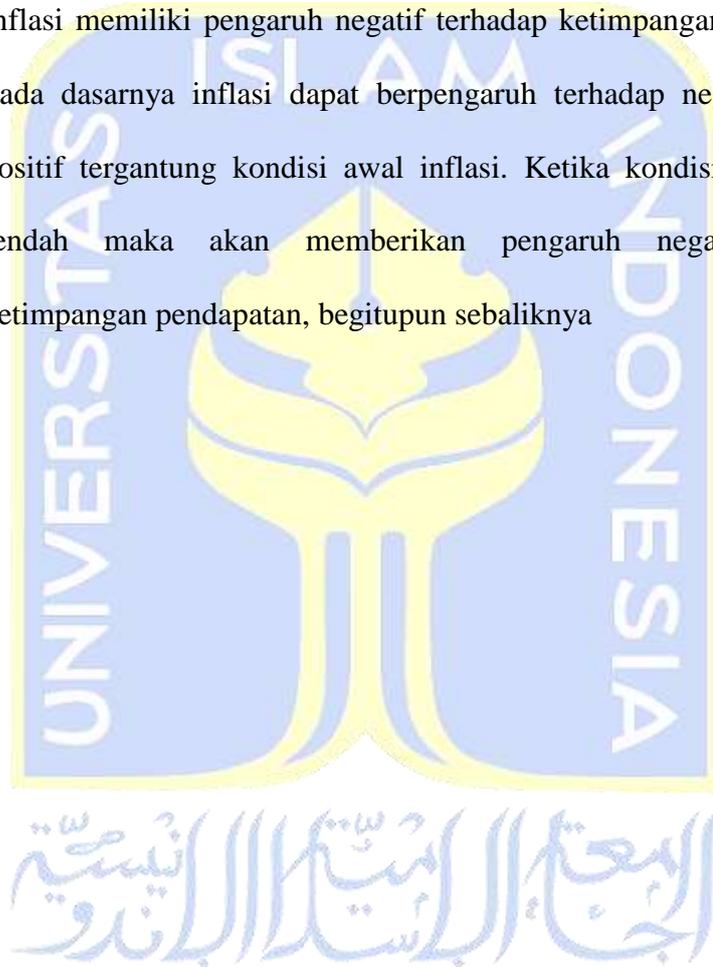
belanja modal meningkat maka tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Jawa Tengah akan meningkat.

5. Variabel inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, artinya bahwa ketika inflasi meningkat maka tingkat ketimpangan pendapatan akan mengalami penurunan.

5.2 Implikasi

1. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu seluruh masyarakat dapat merasakannya, karena kenaikan pertumbuhan ekonomi hanya dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki pendapatan tinggi sehingga pengaruh pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat.
2. Upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan, upah minimum mempunyai pengaruh besar terhadap ketimpangan, karena ketika upah minimum meningkat hanya di berbagai wilayah kota besar maka ketimpangan pendapatan akan semakin memburuk. Selain itu, kebijakan pemerintah yang berkaitan mengenai peningkatan upah minimum sangat diperlukan. Tugas penting pemerintah adalah menjaga agar kenaikan upah minimum tidak membuat ketimpangan pendapatan semakin memburuk.

3. Pemerintah harus dapat meratakan penyaluran belanja modal untuk seluruh wilayah agar perbaikan infrastruktur juga memberikan keuntungan bagi wilayah yang masih tertinggal, mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan menengah kebawah.
4. Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Pada dasarnya inflasi dapat berpengaruh terhadap negatif maupun positif tergantung kondisi awal inflasi. Ketika kondisi awal inflasi rendah maka akan memberikan pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, begitupun sebaliknya



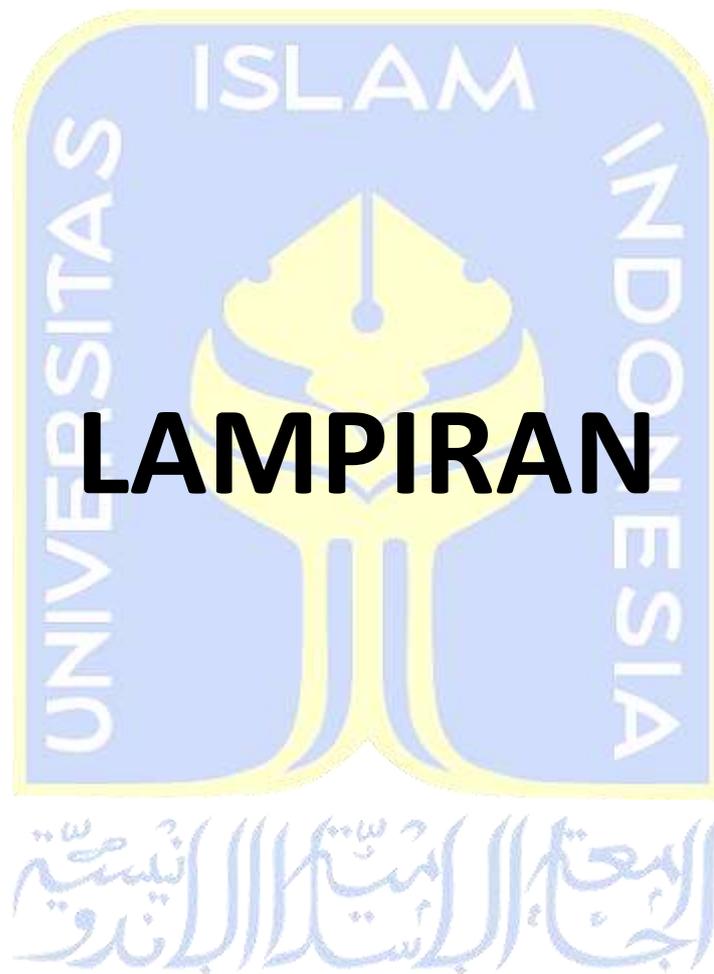
DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, R.. (2013), “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Tengah”. ISSN 1979-715X, 2013, 42-53.
- Adisasmita, Rahardjo (2013), Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agusta, Ivanovich (2014), Ketimpangan Wilayah dan Kebijakan Penanggulangan di Indonesia: Kajian Isu Strategis, Historis, dan Pradigmatis Sejak Pra Kolonial. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin (2004), Ekonomi Pembangunan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik (2011), Indikator Utama Sosial Politik dan Keamanan Jawa Tengah 2011. Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah.
- _____ (2015), Indikator Utama Sosial Politik dan Keamanan Jawa Tengah 2015. Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah.
- _____ (2016), Pemertaan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah 2016. Badan Pusat Statistik. Jawa Tengah.
- Badrudin, Rudy (2012), Ekonomika Otonomi Daerah. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Brata, Aloysius Gunadi (2002), Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional di Indonesia. JEP Vol 7, No. 2, 113-122.
- Dewi, Diah Pradnya, Ida Bagus Putu (2017), Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali. E-Jurnal Vol. 6, No.2. Februari 2017

- Ferryanto, Nur (2014), *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam (2005), *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, BP UNDIP, Semarang
- Hakim, Abdul (2002), *Ekonomi Pembangunan*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Hasibuan, Nurimansjah (1993), *Pemerataan dan Pembangunan Ekonomi*. Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Kuncoro, Mudrajad (1997), *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Lestari, Susi (2016), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Jawa Timur Tahun 2008-2012*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Musfidar, Ma'mun (2012), "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan Tahun 2001-2010", Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Hasanuddin. Makasar.
- Ngakan Putu. Dan Made Suyana (2013), "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar", Vol 2, No 3, Maret 2013, 119-128.
- Prasetyo, P. Eko (2009). "Fundamental Makro Ekonomi". Beta Offset, Yogyakarta
- Rosyadi, M. Irfan (2014). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan antar Provinsi di Pulau Sumatera" Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan) Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

- Sultan dan Jamzani (2010), “Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY- Jawa Tengah serta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Periode (2000-2004)”, Vol 8, No 1, April 2010, 1-70.
- Sukirno, Sadono (2011), *Makro Ekonomi Pengantar Teori Edisi Ketiga*, Rajawali Pers, Jakarta .
- Sumarsono, Sonny (2003), *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakeraan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Suryana, (2000), *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat, Jakarta
- Sriyana, Jaka (2014), *Metode Regresi Data Panel (Dilengkapi Analisis Kinerja Bank Syariah di Indonesia)*, Ekonisia, Yogyakarta.
- Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C, (2003), *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Kedelapan*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- _____ (2011), *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas Jilid 1*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Umiyati, Etik (2013), *Analisa Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Pulau Sumatera*. Vol 1. No. 7 April 2013.
- Yanthi, Cokorda IDP. & Marhaeni (2015), “Pengaruh, Pendidikan, Tingkat Upah dan Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”, *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Volume XI No.2 , Desember 2015.





LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Data Ketimpangan Jawa Tengah (Persen)

Wilayah Jateng	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PROVINSI JAWA TENGAH	0,37	0,38	0,38	0,39	0,38	0,38
Kabupaten Cilacap	0,25	0,30	0,32	0,37	0,34	0,33
Kabupaten Banyumas	0,34	0,35	0,34	0,36	0,32	0,40
Kabupaten Purbalingga	0,24	0,28	0,33	0,32	0,30	0,33
Kabupaten Banjarnegara	0,26	0,36	0,33	0,39	0,34	0,32
Kabupaten Kebumen	0,23	0,34	0,35	0,31	0,28	0,30
Kabupaten Purworejo	0,29	0,36	0,31	0,34	0,38	0,34
Kabupaten Wonosobo	0,25	0,35	0,38	0,34	0,35	0,37
Kabupaten Magelang	0,25	0,32	0,33	0,34	0,34	0,36
Kabupaten Boyolali	0,27	0,36	0,38	0,40	0,30	0,34
Kabupaten Klaten	0,25	0,32	0,33	0,34	0,36	0,35
Kabupaten Sukoharjo	0,30	0,33	0,35	0,34	0,35	0,35
Kabupaten Wonogiri	0,29	0,35	0,32	0,34	0,33	0,31
Kabupaten Karanganyar	0,29	0,37	0,40	0,33	0,36	0,33
Kabupaten Sragen	0,28	0,35	0,37	0,35	0,33	0,37
Kabupaten Grobogan	0,28	0,32	0,35	0,34	0,34	0,29
Kabupaten Blora	0,26	0,33	0,38	0,41	0,39	0,34
Kabupaten Rembang	0,19	0,27	0,33	0,32	0,33	0,30
Kabupaten Pati	0,24	0,29	0,29	0,30	0,31	0,35
Kabupaten Kudus	0,24	0,35	0,34	0,34	0,37	0,33
Kabupaten Jepara	0,20	0,32	0,35	0,33	0,31	0,32
Kabupaten Demak	0,24	0,31	0,34	0,33	0,32	0,28
Kabupaten Semarang	0,28	0,33	0,36	0,31	0,31	0,32
Kabupaten Temanggung	0,28	0,38	0,35	0,34	0,38	0,38
Kabupaten Kendal	0,27	0,37	0,36	0,32	0,34	0,35
Kabupaten Batang	0,28	0,28	0,31	0,30	0,29	0,28
Kabupaten Pekalongan	0,23	0,28	0,28	0,27	0,29	0,31
Kabupaten Pemalang	0,20	0,26	0,25	0,24	0,28	0,31
Kabupaten Tegal	0,30	0,28	0,32	0,32	0,33	0,32
Kabupaten Brebes	0,23	0,33	0,32	0,31	0,32	0,29
Kota Magelang	0,31	0,34	0,37	0,33	0,36	0,34
Kota Surakarta	0,34	0,33	0,37	0,35	0,36	0,35
Kota Salatiga	0,35	0,34	0,35	0,37	0,35	0,38
Kota Semarang	0,32	0,35	0,35	0,35	0,31	0,33
Kota Pekalongan	0,28	0,31	0,33	0,32	0,34	0,32
Kota Tegal	0,24	0,32	0,33	0,32	0,31	0,35

LAMPIRAN II

Data Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah (persen)

Wilayah Jateng	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	4,41	4,07	1,98	1,66	2,92	5,94
Kabupaten Banyumas	0,34	0,35	0,34	0,36	0,32	0,40
Kabupaten Purbalingga	5,67	5,67	5,79	5,27	4,85	5,43
Kabupaten Banjarnegara	4,89	5,44	5,23	5,44	5,31	5,47
Kabupaten Kebumen	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15	4,15
Kabupaten Purworejo	5,01	5,64	4,59	4,94	4,48	5,37
Kabupaten Wonosobo	4,29	5,37	4,70	4,00	4,78	4,85
Kabupaten Magelang	4,51	6,68	4,88	5,91	5,38	5,03
Kabupaten Boyolali	3,60	6,34	5,33	5,83	5,42	5,91
Kabupaten Klaten	1,73	6,29	5,71	5,96	5,84	5,30
Kabupaten Sukoharjo	4,65	5,88	5,90	5,78	5,40	5,69
Kabupaten Wonogiri	5,87	3,58	5,94	4,78	5,26	5,40
Kabupaten Karanganyar	5,42	4,95	5,90	5,69	5,22	5,05
Kabupaten Sragen	6,09	6,55	6,12	6,70	5,59	6,05
Kabupaten Grobogan	5,05	3,19	5,08	4,57	4,07	5,96
Kabupaten Blora	5,04	4,42	4,90	5,36	4,39	5,36
Kabupaten Rembang	4,45	5,19	5,32	5,43	5,15	5,50
Kabupaten Pati	5,11	5,91	5,93	5,97	4,64	5,94
Kabupaten Kudus	4,17	4,24	4,11	4,36	4,43	3,90
Kabupaten Jepara	4,52	4,92	5,86	5,39	4,81	5,04
Kabupaten Demak	4,12	5,39	4,46	5,27	4,29	5,93
Kabupaten Semarang	4,90	6,27	6,03	5,97	5,85	5,52
Kabupaten Temanggung	4,31	6,09	4,27	5,20	5,03	5,21
Kabupaten Kendal	5,97	6,57	5,21	6,22	5,14	5,25
Kabupaten Batang	4,97	6,12	4,62	5,88	5,31	5,42
Kabupaten Pekalongan	4,27	5,56	4,81	5,99	4,95	4,78
Kabupaten Pemalang	4,94	5,01	5,32	5,57	5,52	5,58
Kabupaten Tegal	4,83	6,39	5,23	6,73	5,03	5,45
Kabupaten Brebes	4,94	6,65	4,58	5,91	5,30	5,98
Kota Magelang	6,12	6,11	5,37	6,04	4,98	5,11
Kota Surakarta	5,94	6,42	5,58	6,25	5,28	5,44
Kota Salatiga	5,01	6,58	5,53	6,30	5,57	5,17
Kota Semarang	5,87	6,58	5,97	6,25	6,31	5,80
Kota Pekalongan	5,51	5,49	5,61	5,91	5,48	5,00
Kota Tegal	4,61	6,47	4,21	5,67	5,04	5,45

LAMPIRAN III

Data Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah (persen)

Wilayah Jateng	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PROVINSI JAWA TENGAH	66,08	66,64	67,21	68,02	68,78	69,49
Kabupaten Cilacap	64,18	64,73	65,72	66,80	67,25	67,77
Kabupaten Banyumas	66,87	67,45	68,06	68,55	69,25	69,89
Kabupaten Purbalingga	63,61	64,33	64,94	65,53	66,23	67,03
Kabupaten Banjarnegara	60,70	61,58	62,29	62,84	63,15	64,73
Kabupaten Kebumen	63,08	64,05	64,47	64,86	65,67	66,87
Kabupaten Purworejo	68,16	69,11	69,40	69,77	70,12	70,37
Kabupaten Wonosobo	62,50	63,07	64,18	64,57	65,20	65,70
Kabupaten Magelang	63,28	64,16	64,75	65,86	66,35	67,13
Kabupaten Boyolali	68,76	69,14	69,51	69,81	70,34	71,74
Kabupaten Klaten	70,76	71,16	71,71	72,42	73,19	73,81
Kabupaten Sukoharjo	71,53	72,34	72,81	73,22	73,76	74,53
Kabupaten Wonogiri	63,90	64,75	65,75	66,40	66,77	67,76
Kabupaten Karanganyar	70,31	71,00	72,26	73,33	73,89	74,26
Kabupaten Sragen	67,67	68,12	68,91	69,95	70,52	71,10
Kabupaten Grobogan	64,56	65,41	66,39	67,43	67,77	68,05
Kabupaten Blora	63,02	63,88	64,70	65,37	65,84	66,22
Kabupaten Rembang	64,53	65,36	66,03	66,84	67,40	68,18
Kabupaten Pati	65,13	65,71	66,13	66,47	66,99	68,51
Kabupaten Kudus	69,22	69,89	70,57	71,58	72,00	72,72
Kabupaten Jepara	66,76	67,63	68,45	69,11	69,61	70,02
Kabupaten Demak	66,02	66,84	67,55	68,38	68,95	69,75
Kabupaten Semarang	69,58	70,35	70,88	71,29	71,65	71,89
Kabupaten Temanggung	63,08	64,14	64,91	65,52	65,97	67,07
Kabupaten Kendal	66,23	66,96	67,55	67,98	68,46	69,57
Kabupaten Batang	61,64	62,59	63,09	63,60	64,07	65,46
Kabupaten Pekalongan	63,75	64,72	65,33	66,26	66,98	67,40
Kabupaten Pemalang	58,64	59,66	60,78	61,81	62,35	63,70
Kabupaten Tegal	61,14	61,97	62,67	63,50	64,10	65,04
Kabupaten Brebes	59,49	60,51	60,92	61,87	62,55	63,18
Kota Magelang	77,99	74,47	75,00	75,29	75,79	76,39
Kota Surakarta	77,45	78,00	78,44	78,89	79,34	80,14
Kota Salatiga	78,35	78,76	79,1	79,37	79,98	80,96
Kota Semarang	76,96	77,58	78,04	78,68	79,24	80,23
Kota Pekalongan	68,95	69,54	69,95	70,82	71,53	72,69
Kota Tegal	69,33	70,03	70,68	71,44	72,20	72,96

LAMPIRAN IV

Data Upah Minimum Regional Jawa Tengah (Ribu Rupiah)

Wilayah Jateng	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PROVINSI JAWA TENGAH	660.000	675.000	765.000	830.000	910.000	910.000
Kabupaten Cilacap	698.333	718.600	773.000	887.600	1.050.000	1.195.600
Kabupaten Banyumas	670.000	750.000	795.000	877.500	1.000.000	1.100.000
Kabupaten Purbalingga	695.000	765.000	818.500	896.500	1.023.000	1.101.600
Kabupaten Banjarnegara	662.000	730.000	765.000	835.000	920.000	1.112.500
Kabupaten Kebumen	700.000	727.500	770.000	835.000	975.000	1.157.500
Kabupaten Purworejo	719.000	755.000	809.000	849.000	910.000	1.165.000
Kabupaten Wonosobo	715.000	775.000	825.000	880.000	990.000	1.166.000
Kabupaten Magelang	752.000	802.500	870.000	942.000	1.152.000	1.255.000
Kabupaten Boyolali	748.000	800.500	836.000	895.000	1.116.000	1.197.800
Kabupaten Klaten	735.000	766.022	812.000	871.500	1.02.6600	1.170.000
Kabupaten Sukoharjo	769.500	790.500	843.000	902.000	1.150.000	1.223.000
Kabupaten Wonogiri	695.000	730.000	775.000	830.000	954.000	1.101.000
Kabupaten Karanganyar	761.000	801.500	846.000	896.500	1.060.000	1.226.000
Kabupaten Sragen	724.000	760.000	810.000	864.000	960.000	1.105.000
Kabupaten Grobogan	687.500	735.000	785.000	842.000	935.000	1.160.000
Kabupaten Blora	742.000	816.200	855.500	932.000	1.009.000	1.180.000
Kabupaten Rembang	702.000	757.600	816.000	896.000	985.000	1.120.000
Kabupaten Pati	733.000	769.550	837.500	927.600	1.013.027	1.176.500
Kabupaten Kudus	775.000	840.000	889.000	990.000	1.150.000	1.380.000
Kabupaten Jepara	702.000	758.000	800.000	875.000	1.000.000	1.150.000
Kabupaten Demak	813.400	847.987	893.000	995.000	1.280.000	1.535.000
Kabupaten Semarang	824.000	880.000	941.600	1.051.000	1.208.200	1.419.000
Kabupaten Temanggung	709.500	779.000	866.000	940.000	1.050.000	1.178.000
Kabupaten Kendal	780.000	843.750	904.500	953.100	1.206.000	1.383.450
Kabupaten Batang	745.000	805.000	880.000	970.000	1.146.000	1.270.000
Kabupaten Pekalongan	760.000	810.000	873.000	962.000	1.145.000	1.271.000
Kabupaten Pemalang	675.000	725.000	793.000	908.000	1.066.000	1.193.400
Kabupaten Tegal	687.000	725.000	780.000	850.000	1.000.000	1.155.000
Kabupaten Brebes	681.000	717.000	775.000	859.000	1.000.000	1.166.550
Kota Magelang	745.000	795.000	837.000	901.500	1.037.000	1.211.000
Kota Surakarta	785.000	826.252	864.450	915.900	1.145.000	1.222.400
Kota Salatiga	803.185	843.469	901.396	974.000	1.170.000	1.287.000
Kota Semarang	939.756	961.323	991.500	1.209.100	1.423.500	1.685.000
Kota Pekalongan	760.000	810.000	895.500	980.000	1.165.000	1.291.000
Kota Tegal	700.000	735.000	795.000	860.000	1.044.000	1.206.000

LAMPIRAN V

Data Inflasi Jawa Tengah (persen)

Wilayah Jateng	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
PROVINSI JAWA TENGAH	6,88	2,68	4,24	7,99	8,22	2,73
Kabupaten Cilacap	5,65	5,27	6,87	8,37	8,19	2,63
Kabupaten Banyumas	6,04	3,40	4,73	8,50	7,09	2,52
Kabupaten Purbalingga	7,82	4,47	4,09	9,57	9,08	1,62
Kabupaten Banjarnegara	7,13	4,73	4,55	8,35	7,78	2,97
Kabupaten Kebumen	8,36	4,52	4,64	10,46	7,36	2,91
Kabupaten Purworejo	7,56	2,52	3,66	7,14	8,48	3,45
Kabupaten Wonosobo	6,06	2,66	3,84	8,82	8,44	2,71
Kabupaten Magelang	8,25	2,64	2,59	8,34	7,91	3,60
Kabupaten Boyolali	7,34	3,35	3,45	8,21	7,45	2,58
Kabupaten Klaten	7,90	1,67	3,65	7,92	7,76	2,57
Kabupaten Sukoharjo	6,67	2,63	4,22	8,42	7,93	2,69
Kabupaten Wonogiri	6,66	3,00	3,43	8,60	7,20	2,13
Kabupaten Karanganyar	7,26	3,31	3,29	8,70	7,38	2,40
Kabupaten Sragen	6,77	2,86	3,74	7,55	8,51	3,05
Kabupaten Grobogan	7,45	1,86	4,48	7,88	8,03	3,31
Kabupaten Blora	7,17	2,26	3,55	7,94	7,13	2,85
Kabupaten Rembang	6,61	2,73	4,28	6,88	7,59	2,66
Kabupaten Pati	6,36	2,30	3,92	7,57	8,01	3,23
Kabupaten Kudus	7,65	3,34	4,77	8,31	8,59	3,28
Kabupaten Jepara	6,24	3,59	4,52	7,95	9,87	4,57
Kabupaten Demak	6,87	3,49	4,10	8,22	8,69	2,80
Kabupaten Semarang	7,07	3,29	4,56	8,11	8,63	2,85
Kabupaten Temanggung	7,35	2,42	4,73	7,01	7,81	2,74
Kabupaten Kendal	5,89	3,49	3,89	6,90	8,34	4,13
Kabupaten Batang	6,62	3,01	3,83	8,08	7,66	2,94
Kabupaten Pekalongan	6,54	2,65	2,96	8,18	8,32	3,42
Kabupaten Pemasang	7,38	2,80	4,04	6,52	7,38	3,52
Kabupaten Tegal	6,44	2,74	4,13	7,79	8,48	3,64
Kabupaten Brebes	6,04	3,09	4,61	9,83	6,20	3,08
Kota Magelang	6,80	4,15	-	7,79	7,92	2,70
Kota Surakarta	6,65	1,93	2,87	8,32	8,01	2,56
Kota Salatiga	6,65	2,84	4,12	7,67	7,84	2,61
Kota Semarang	7,11	2,87	0,41	8,19	8,53	2,56
Kota Pekalongan	6,77	2,45	3,55	7,40	7,82	3,46
Kota Tegal	6,73	2,58	0,40	5,80	7,40	3,95

LAMPIRAN VI

Data Belanja Modal Jawa Tengah

Wilayah Jateng	Tahun					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Cilacap	163.912.215	199.536.085	308.872.109	324.565.434	414.435.434	345.452.746
Kabupaten Banyumas	103.063.443	275.513.950	234.952.033	409.457.066	360.164.899	380.986.849
Kabupaten Purbalingga	43.188.404	82.050.863	126.673.451	125.910.393	112.249.666	148.475.886
Kabupaten Banjarnegara	130.875.388	151.462.583	158.300.839	163.097.211	206.495.161	278.333.398
Kabupaten Kebumen	118.771.774	145.573.737	295.209.004	254.695.450	465.778.358	276.330.360
Kabupaten Purworejo	62.069.455	105.264.670	149.104.919	164.192.112	216.762.939	169.301.395
Kabupaten Wonosobo	39.161.031	138.667.963	189.467.150	227.460.894	206.098.071	270.968.478
Kabupaten Magelang	97.925.510	155.334.855	95.350.818	279.926.163	319.022.187	272.701.298
Kabupaten Boyolali	100.101.216	141.318.320	207.758.567	248.858.868	303.852.818	280.013.885
Kabupaten Klaten	40.141.788	155.310.397	182.607.368	181.802.674	268.640.275	262.171.829
Kabupaten Sukoharjo	62.128.064	88.587.624	233.723.888	202.558.561	197.957.954	240.338.997
Kabupaten Wonogiri	103.336.225	138.829.890	185.814.439	194.260.372	223.887.557	253.534.951
Kabupaten Karanganyar	105.157.368	70.949.729	122.761.422	126.882.501	223.287.901	183.435.473
Kabupaten Sragen	86.363.573	98.859.169	125.506.271	102.837.977	267.219.055	174.926.142
Kabupaten Grobogan	91.688.215	184.927.114	190.074.980	383.575.199	300.522.182	272.012.467
Kabupaten Blora	21.200.833	204.602.263	219.108.000	277.566.000	335.136.756	267.984.607
Kabupaten Rembang	92.130.262	157.302.287	198.363.002	184.417.658	151.454.913	193.735.207
Kabupaten Pati	68.355.051	128.347.164	174.150.126	253.211.435	224.653.196	185.463.889
Kabupaten Kudus	165.051.954	162.858.249	178.143.373	149.339.581	256.850.821	375.069.995
Kabupaten Jepara	119.766.418	191.515.456	297.197.282	186.955.735	188.924.406	186.171.964
Kabupaten Demak	126.893.230	200.545.968	339.017.860	295.427.405	540.353.999	382.085.254
Kabupaten Semarang	76.038.688	129.986.292	264.416.604	245.412.873	272.265.415	213.098.044
Kabupaten Temanggung	44.833.858	73.677.335	162.080.117	204.630.140	198.451.767	305.690.716
Kabupaten Kendal	134.086.916	209.622.862	192.581.646	245.668.869	261.586.076	244.083.901
Kabupaten Batang	25.478.767	72.586.401	133.480.485	151.126.358	157.304.196	183.102.504
Kabupaten Pekalongan	73.291.109	96.333.231	124.487.024	201.327.183	187.872.467	227.713.108
Kabupaten Pemalang	77.174.267	95.000.076	128.366.719	288.004.508	164.388.706	283.606.209
Kabupaten Tegal	131.061.229	175.031.591	303.315.035	222.930.142	226.087.649	335.924.044
Kabupaten Brebes	131.399.495	234.397.107	192.983.349	403.345.047	282.972.400	356.274.138
Kota Magelang	47.661.416	66.479.088	79.135.574	122.368.243	127.622.979	141.523.194
Kota Surakarta	79.762.500	245.921.993	186.150.293	264.918.135	286.491.757	170.840.305
Kota Salatiga	89.642.824	86.935.202	124.905.280	163.571.299	120.272.969	190.395.934
Kota Semarang	216.486.091	338.248.712	351.853.782	719.171.070	688.545.884	99.011.812
Kota Pekalongan	56.465.655	75.889.488	103.505.879	118.778.300	159.183.156	174.509.294
Kota Tegal	6.612.021	97.060.785	73.304.444	116.630.808	115.598.832	174.613.601

LAMPIRAN VII

Uji Signifikansi *Common Effect*

Dependent Variable: GR
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/21/18 Time: 19:44
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (unbalanced) observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.244707	0.171322	-1.428343	0.1547
PE	0.002083	0.002937	0.709462	0.4789
IPM	0.003096	0.000552	5.608653	0.0000
LOG_UMR	-0.010920	0.015784	-0.691857	0.4898
LOG_BM	0.026755	0.004638	5.768465	0.0000
IF	-0.002358	0.001002	-2.354695	0.0195
R-squared	0.325881	Mean dependent var	0.321627	
Adjusted R-squared	0.309277	S.D. dependent var	0.040123	
S.E. of regression	0.033346	Akaike info criterion	-3.935471	
Sum squared resid	0.225727	Schwarz criterion	-3.839519	
Log likelihood	417.2567	Hannan-Quinn criter.	-3.896677	
F-statistic	19.62672	Durbin-Watson stat	1.157539	
Prob(F-statistic)	0.000000			

LAMPIRAN VIII

Uji Signifikansi *Random Effect*

Dependent Variable: GR
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 02/21/18 Time: 19:47
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (unbalanced) observations: 209
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.334775	0.143145	-2.338713	0.0203
PE	0.002186	0.002766	0.790370	0.4302
IPM	0.003600	0.000799	4.506868	0.0000
LOG_UMR	-0.013568	0.014290	-0.949452	0.3435
LOG_BM	0.031571	0.004459	7.080347	0.0000
IF	-0.002311	0.000802	-2.880748	0.0044
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			0.017625	0.3085
Idiosyncratic random			0.026388	0.6915
Weighted Statistics				
R-squared	0.363604	Mean dependent var		0.168017
Adjusted R-squared	0.347929	S.D. dependent var		0.034957
S.E. of regression	0.028145	Sum squared resid		0.160800
F-statistic	23.19675	Durbin-Watson stat		1.635401
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.317589	Mean dependent var		0.321627
Sum squared resid	0.228503	Durbin-Watson stat		1.150851

Uji Signifikansi *Fixed Effect*

Dependent Variable: GR
 Method: Panel Least Squares
 Date: 02/21/18 Time: 20:02
 Sample: 2010 2015
 Periods included: 6
 Cross-sections included: 35
 Total panel (unbalanced) observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.002087	0.163580	0.012756	0.9898
PE	0.001247	0.003025	0.412323	0.6806
IPM	0.029199	0.005114	5.709472	0.0000
LOG_UMR	-0.154035	0.031151	-4.944744	0.0000
LOG_BM	0.023487	0.005422	4.332061	0.0000
IF	-0.002371	0.000807	-2.938366	0.0038

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.648552	Mean dependent var	0.321627
Adjusted R-squared	0.567448	S.D. dependent var	0.040123
S.E. of regression	0.026388	Akaike info criterion	-4.261457
Sum squared resid	0.117681	Schwarz criterion	-3.621776
Log likelihood	485.3223	Hannan-Quinn criter.	-4.002830
F-statistic	7.996602	Durbin-Watson stat	2.087164
Prob(F-statistic)	0.000000		

Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: EQ02_RANDOM_BM_IF
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	33.013885	5	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PE	0.001247	0.002186	0.000001	0.4428
IPM	0.029199	0.003600	0.000026	0.0000
LOG_UMR	-0.154035	-0.013568	0.000766	0.0000
LOG_BM	0.023487	0.031571	0.000010	0.0088
IF	-0.002371	-0.002311	0.000000	0.4919

Cross-section random effects test equation:
Dependent Variable: GR
Method: Panel Least Squares
Date: 02/21/18 Time: 19:53
Sample: 2010 2015
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (unbalanced) observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.002087	0.163580	0.012756	0.9898
PE	0.001247	0.003025	0.412323	0.6806
IPM	0.029199	0.005114	5.709472	0.0000
LOG_UMR	-0.154035	0.031151	-4.944744	0.0000
LOG_BM	0.023487	0.005422	4.332061	0.0000
IF	-0.002371	0.000807	-2.938366	0.0038

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.648552	Mean dependent var	0.321627
Adjusted R-squared	0.567448	S.D. dependent var	0.040123
S.E. of regression	0.026388	Akaike info criterion	-4.261457
Sum squared resid	0.117681	Schwarz criterion	-3.621776
Log likelihood	485.3223	Hannan-Quinn criter.	-4.002830
F-statistic	7.996602	Durbin-Watson stat	2.087164
Prob(F-statistic)	0.000000		

LAMPIRAN XI

Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: EQ02_RANDOM_BM_IF
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	4.563591	(34,169)	0.0000
Cross-section Chi-square	136.131107	34	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:
Dependent Variable: GR
Method: Panel Least Squares
Date: 02/21/18 Time: 19:57
Sample: 2010 2015
Periods included: 6
Cross-sections included: 35
Total panel (unbalanced) observations: 209

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.244707	0.171322	-1.428343	0.1547
PE	0.002083	0.002937	0.709462	0.4789
IPM	0.003096	0.000552	5.608653	0.0000
LOG_UMR	-0.010920	0.015784	-0.691857	0.4898
LOG_BM	0.026755	0.004638	5.768465	0.0000
IF	-0.002358	0.001002	-2.354695	0.0195
R-squared	0.325881	Mean dependent var		0.321627
Adjusted R-squared	0.309277	S.D. dependent var		0.040123
S.E. of regression	0.033346	Akaike info criterion		-3.935471
Sum squared resid	0.225727	Schwarz criterion		-3.839519
Log likelihood	417.2567	Hannan-Quinn criter.		-3.896677
F-statistic	19.62672	Durbin-Watson stat		1.157539
Prob(F-statistic)	0.000000			